



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK. 02.02/MENKES/66/2015

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah secara nyata di provinsi dan kabupaten/kota, perlu adanya dukungan dana pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015.

KESATU : Alokasi dana dekonsentrasi di provinsi ditujukan untuk:

- a. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan;
- b. program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- c. program pembinaan upaya kesehatan;
- d. program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. program kefarmasian dan alat kesehatan.

KEDUA : Alokasi dana tugas pembantuan di provinsi/kabupaten/kota ditujukan untuk:

- a. program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; dan
- c. program pembinaan upaya kesehatan.g

KETIGA . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Ruang lingkup kegiatan masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Rincian alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua untuk setiap satuan kerja tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinas kesehatan provinsi.
- KEENAM : Anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dialokasikan dalam DIPA SKPD dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.
- KETUJUH : Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 024 Kementerian Kesehatan Tahun 2015.
- KEDELAPAN : Petunjuk teknis program sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan (fisik) dan realisasi anggaran bulanan dengan batas waktu 1 (satu) minggu setelah akhir bulan, laporan triwulan dengan batas waktu 1 (satu) minggu setelah akhir triwulan, dan laporan tahunan sebagai akhir pelaksanaan kegiatan (fisik) anggaran Tahun 2015 pada minggu I Februari 2016.

KESEPULUH . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KESEPULUH : Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan atas realisasi anggaran dan pengelolaan barang milik negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di daerah (dekonsentrasi/tugas pembantuan), diatur sebagai berikut :

- a. Gubernur/Bupati/Walikota wajib membentuk Unit Akuntansi Instansi tingkat wilayah provinsi/kabupaten/kota yaitu Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/ B-W).
- b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membentuk unit akuntansi instansi tingkat satuan kerja yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) untuk masing-masing DIPA Program, bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan.

KESEBELAS : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W), sebagaimana dimaksud Diktum Kesepuluh bertugas :

- a. menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan masing-masing DIPA Program di provinsi/kabupaten/ kota menjadi laporan keuangan tingkat wilayah.
- b. menyampaikan laporan keuangan tingkat wilayah kepada masing-masing Unit Eselon I sesuai ketentuan.

KEDUABELAS : Laporan yang disampaikan oleh SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

KETIGABELAS . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Menkes/SK/II/2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
10. Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan
11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/66/2015
TENTANG
ALOKASI ANGGARAN DANA
DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

RUANG LINGKUP KEGIATAN
MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Rp. 259.806.300.000,-

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan di daerah tahun 2015 disediakan dana dekonsentrasi sebesar Rp259.806.300.000,-. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 42 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan TA 2015

Dana Dekonsentrasi ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan, antara lain:

1. KEGIATAN : PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

- a. Mengikuti Pra Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Pra Rakerkesnas).
- b. Mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas).
- c. Mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program (Rakorpop).
- d. Mengikuti Pertemuan Penyusunan RKA Dekonsentrasi-01 Satker Biro Perencanaan dan Anggaran.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan.
- f. Mengikuti Sosialisasi Juknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Penyusunan RKA DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016.
- g. Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kesehatan.
- h. Mengikuti Pertemuan Penelitian/Reviu RKA-KL Alokasi Anggaran.
- i. Sosialisasi e-Renggar di Provinsi.
- j. Pertemuan Pra Rakontek Perencanaan di Provinsi.
- k. Mengikuti Rakontek Perencanaan.
- l. Mengikuti Penyusunan RKA-KL TA 2016.
- m. Mengikuti Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersumber APBN di Pusat.
- n. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersumber APBN di Provinsi.
- o. PertemuanPra Rakontek DAK TA 2016 di Provinsi.

2. KEGIATAN : PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

- a. Honorarium percepatan pengelolaan administrasi (SIMPEG) Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan Khusus di provinsi dan kabupaten/kota(menu wajib).
- b. Pendataan tenaga PTT dan Penugasan Khusus di kabupaten/kota (penempatan tugas) (menu wajib).
- c. Monev/*Review*/pembinaan dinas provinsi ke kabupaten/kota terkait pengelolaan tenaga PTT dan Penugasan Khusus (menu wajib).
- d. Konsultasi dinas provinsi ke pusat terkait PTT dan Penugasan Khusus (wajib).
- e. Pengadaan ATK, fotokopi dan biaya pengiriman berkas PTT dan Penugasan Khusus (wajib).
- f. Rapat koordinasi pengelola kepegawaian PTT dan Penugasan Khusus dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebutuhan di daerah (menu pilihan).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- g. Apabila seluruh menu wajib telah cukup dialokasikan dan masih terdapat sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk kegiatan yang mendukung tercapainya *output* (keluaran) dari kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian.

3. KEGIATAN : PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

- a. Pengelolaan Satuan Kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan.
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-wilayah Dekonsentrasi di Dinas Kesehatan Provinsi untuk seluruh Program Kemenkes dalam penyusunan laporan keuangan (LRA, Neraca, CaLK) Unit Akuntansi yg bersangkutan.
- c. Pertemuan Pengelolaan Keuangan dan BMN Semester dan Tahunan.
- d. Pengadaan Peralatan Penunjang Kegiatan SAK dan SIMAK-BMN.
- e. Kegiatan Tindak Lanjut dan Rekonsiliasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat Jenderal.

4. KEGIATAN : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

- a. Honorarium pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) provinsi dan kabupaten/kota (menu wajib).
- b. Pemutakhiran dan analisis Data Tingkat Provinsi (menu wajib).
- c. Pengumpulan dan Penyediaan data profil (menu pilihan).
- d. Pertemuan berkala triwulan (Profil, Komdat, PMKDR, Sikda) dengan pengelola program Dinkes dan RS (menu pilihan).
- e. Diklat (profil, SIKNAS *online*, Komdat, WEB, database, GIS, survei cepat, jaringan, PMKDR) (menu pilihan).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- f. Penguatan pemanfaatan sarana pendukung SIK untuk Provinsi.

5. KEGIATAN : PENINGKATAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

RUANG LINGKUP KEGIATAN:

Pengadaan pakaian seragam Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) kloter di 13 (tiga belas) embarkasi haji, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

6. KEGIATAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

- a. Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan
Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan adalah kebijakan yang dibuat oleh provinsi baik oleh Dinas Kesehatan maupun sektoral berupa Peraturan daerah, peraturan/surat edaran/SK (gubernur, bupati dan walikota) yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- b. Kelompok Kerja Operasional UKBM atau Forum Peduli Kesehatan
Kelompok kerja operasional atau forum peduli kesehatan adalah kelompok kerja operasional atau forum peduli kesehatan yang aktif dan memiliki rencana kegiatan, dan dokumentasi kegiatan di level provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Model Intervensi Promosi Kesehatan
Model intervensi promosi kesehatan adalah model Promosi Kesehatan yang di kembangkan oleh daerah model intervensi spesifik lokal promosi kesehatan model intervensi yang dikembangkan oleh daerah berdasarkan lokal spesifik, replikasi model yang dilakukan daerah lain, implementasi konsep model intervensi yang dikembangkan pusat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

d. Mitra (Ormas, Dunia Usaha/Swasta/Swasta/INGO dan Pihak Lain) yang mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan

Mitra (Ormas, Dunia Usaha/Swasta/Swasta/INGO dan Pihak Lain) yang mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan adalah mitra yang mendukung pembangunan kesehatan adalah jumlah kerja sama yang dilakukan Dinas Kesehatan provinsi dan kab/kota dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta dan pihak lain di lingkup kerjanya provinsi.

e. Tema Kesehatan dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat adalah tema pesan kesehatan pusat yang dikembangkan oleh daerah (spesifik lokal) maupun pengembangan tema pesan yang disusun oleh pusat

f. Dokumen Perencanaan Program Dan Anggaran

7. KEGIATAN : PEMBINAAN, PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

Sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 serta Perpres 12/2013 dan Perpres 111/2013 dengan telah diimplementasikannya JKN oleh BPJS Kesehatan, maka lingkup kegiatan difokuskan untuk **mendukung pelaksanaan penyelenggaraan JKN dan pengembangan pembiayaan kesehatan.**

Dana dekonsentrasi untuk kegiatan pembinaan, pengembangan pembiayaan dan pemeliharaan jaminan kesehatan terdiri dari:

a. WAJIB

1. Operasional Tim Monev JKN Prov/Kab/Kota
2. Koordinasi Pelaksanaan JKN di Prov/Kab/Kota
3. Diseminasi/Sosialisasi JKN dan Pembiayaan Kesehatan bagi Stakeholder
4. Bimbingan Teknis dan Monev Tim JKN Prov/Kab/Kota
5. Konsultasi Teknis Program pelaksanaan JKN dan Pembiayaan Kesehatan
6. Evaluasi Pelaksanaan JKN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

7. Pengelolaan Keuangan DIPA
8. Pengelolaan Data Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan

b. KEGIATAN PILIHAN

1. Pelatihan District Health Account (DHA)
2. Pendampingan Kabupaten/Kota dalam penyusunan DHA
3. Pengelolaan Data PHA/DHA

8. KEGIATAN : PEMBINAAN PENGELOLAAN URUSAN TATA USAHA, KEPROTOKOLAN, RUMAH TANGGA, KEUANGAN DAN GAJI

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi melalui program dukungan dan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan yang diantaranya untuk percepatan pembayaran gaji dan insentif PTT melalui Pengelolaan urusan tata usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji (2037) dengan output Laporan Kegiatan dan Pembinaan (2037.002). Adapun menu dekonsentrasi untuk kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Honorarium Pengelola PTT Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Penggandaan dan Pengiriman Berkas
- c. Pengadaan ATK
- d. Rapat Koordinasi
- e. Menu pilihan :

Apabila seluruh menu wajib telah dialokasikan dan masih terdapat sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk kegiatan yang mendukung tercapainya *output* (keluaran) dari kegiatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji

9. KEGIATAN : PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

1. Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan (dengan komponen : Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan (dengan komponen : Pendampingan Penyusunan Rencana Kontijensi Kesehatan Kabupaten/Kota)

II. PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Rp. 2.029.205.693.000 ,-

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di daerah tahun 2015 dalam upaya percepatan pencapaian indikator MDGs disediakan dana sebesar Rp. 2.029.205.693.000,- yang terdiri dari dana dekonsentrasi sebesar Rp. 648.737.922.000,- dan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 1.380.467.771.000,-

Dana Dekonsentrasi utamanya diarahkan untuk:

1. Melanjutkan kegiatan prioritas 2014 melalui berbagai terobosan dan akselerasi kegiatan 2015.
2. Meningkatkan kemitraan dan sinergisme pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat.
3. Menurunkan angka kematian ibu, angka kematian neonatus, bayi dan anak balita.
4. Menangani masalah gizi kurang dan gizi buruk.
5. Menanggulangi dan memperbaiki gizi.
6. Meningkatkan pendidikan gizi;
7. Meningkatkan upaya kesehatan kerja dan olah raga.
8. Meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
9. Memberikan dukungan manajemen program Bina Gizi dan KIA untuk pengelolaan satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) dinas kesehatan provinsi ; dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang termasuk penyusunan laporan keuangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Dana tersebut disediakan untuk :

1. Pembinaan gizi masyarakat, dengan kegiatan utama:
 - a. Peningkatan kapasitas petugas seperti: penilaian pertumbuhan balita, konseling menyusui, konseling Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), tata laksana anak gizi buruk, dan pemantauan status gizi.
 - b. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pembinaan gizi terpadu.
 - c. Pelaksanaan kampanye gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.
 - d. Pelaksanaan surveilans gizi dan Pemantauan Status Gizi (PSG).
 - e. Pengadaan buku dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) terkait pembinaan gizi.
 - f. Pengadaan dan distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil dan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI).
 - g. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama lintas program (LP)/lintas sektor (LS) terkait perbaikan gizi masyarakat.
 - h. Pelaksanaan manajemen distribusi sarana dan prasarana kegiatan pembinaan gizi.
 - i. Pembinaan teknis, supervisi, monitoring, dan pendampingan.
 - j. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu, dengan kegiatan utama:
 - a. Peningkatan kemampuan teknis petugas kesehatan dan pengelola program dalam pelayanan kesehatan ibu, KB dan reproduksi (pelayanan antenatal terpadu, pelayanan persalinan, KB pasca persalinan, penanganan komplikasi maternal).
 - b. Peningkatan kemampuan manajemen petugas kesehatan dan pengelola program dalam pembinaan kesehatan ibu, KB dan reproduksi (supervisi fasilitatif, Audit Maternal Perinatal, surveillance kematian ibu kesehatan reproduksi darurat, pelayanan kesehatan reproduksi terpadu).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- c. Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan ibu, KB dan reproduksi dengan penguatan kelas ibu hamil, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.
 - d. Penyediaan buku pedoman, petunjuk teknis, modul, materi KIE untuk pelayanan antenatal, persalinan, nifas, penanganan komplikasi maternal, KB dan kesehatan reproduksi.
 - e. Pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis; surveilans kematian ibu, *review* dan evaluasi program.
 - f. Pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan koordinasi/kerja sama Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS), Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Pemerintah Daerah dan semua Mitra Terkait.
 - g. Penetapan sasaran, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan pengolahan data dan analisis dalam intervensi program.
3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak, dengan kegiatan utama:
- a. Peningkatan kapasitas pengelola program dan tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan neonatal esensial, tata laksana Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Stimulasi Deteksi Intervensi dan Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), kelas ibu balita, pelayanan kesehatan anak di Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), penjangkaran kesehatan siswa, penanganan Kekerasan terhadap Anak (KtA), dan orientasi standar nasional PKPR.
 - b. Pelaksanaan surveilans penanganan balita beresiko.
 - c. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP).
 - d. Pengadaan buku, media KIE, instrumen pencatatan pelaporan, kesehatan anak kit.
 - e. Pelaksanaan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi kerja sama organisasi profesi, LSM, Lintas Program (LP)/ Lintas Sektor (LS).
 - f. Pengembangan program skrining hipotiroid kongenital, puskesmas mampu tata laksana KtA, akselerasi pembinaan dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), integrasi posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), rujukan kesehatan anak.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- g. Pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis program.
 - h. Pelaksanaan review dan evaluasi program.
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, dengan kegiatan utama:
- a. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi teknis program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer, dan Sentra Penerapan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T).
 - b. Pelaksanaan fasilitasi integrasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
 - c. Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui asuhan mandiri bidang kesehatan tradisional.
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer, dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
 - e. Pelaksanaan kegiatan penapisan Sentra Penerapan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T), operasional dan pengembangan Jaringan Informasi Data (JID).
5. Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga dengan kegiatan utama:
- a. Peningkatan layanan kesehatan kerja dan olah raga pada fasilitas layanan kesehatan primer (Puskesmas dan klinik), dan fasilitas layanan kesehatan rujukan (Balai Kesehatan Kerja Masyarakat/BKKM dan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat/BKOM, dan Rumah Sakit).
 - b. Pelaksanaan orientasi/pemantapan/pelatihan kesehatan kerja, olahraga dan perkotaan.
 - c. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program (LP)/lintas sektor (LS) dan organisasi profesi bidang kesehatan kerja, olahraga dan perkotaan.
 - d. Pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pembentukan tim dan pembinaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif/GP2SP (Gizi pekerja, ASI dan Kesehatan Reproduksi di tempat kerja).
 - e. Pengendalian risiko kesehatan di lingkungan kerja golongan fisik, kimia, biologi, psikososial, dan ergonomic.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- f. Peningkatan kesehatan pada usia kerja kelompok rentan termasuk nelayan, tenaga kerja migran, dan difabel, serta komunitas di kawasan pemukiman kumuh dan miskin perkotaan.
 - g. Pengembangan dan pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha termasuk Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK).
 - h. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kesehatan kerja, olahraga/kebugaran jasmani dan perkotaan.
6. Dukungan manajemen Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan kegiatan utama:
- a. Pemberian honor pengelolaan satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) dinas kesehatan provinsi dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan/monitoring dan evaluasi program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
 - c. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan BOK.
 - d. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
 - e. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
 - f. Pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk provinsi dan kabupaten/kota TA 2015.
7. Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dengan kegiatan utama :
- a. Pelaksanaan sosialisasi program BOK tingkat provinsi yang melibatkan kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK;
 - c. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke pusat;
 - d. Pemberian honor tim pengelola BOK provinsi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Dana Tugas Pembantuan Program Bina Gizi dan KIA dipergunakan untuk :

1. Pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas, dengan kegiatan utama pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas dan manajemen Puskesmas; yang pembagian alokasinya untuk Puskesmas diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hal hal yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan TA 2015;
2. Pelaksanaan manajemen BOK di kabupaten kota;
3. Pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer, dengan kegiatan utama pelaksanaan kegiatan dukungan program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer untuk wisata kesehatan jamu.

III. PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN **Rp. 3.207.550.122.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah tahun 2015 disediakan dana dekonsentrasi di daerah sebesar Rp.141.490.447.000,- dan dana tugas pembantuan bersumber dari APBN sebesar Rp.1.036.769.675.000,- dan bersumber APBN Perubahan sebesar Rp.2.029.290.000.000.

Dana dekonsentrasi ini dialokasikan untuk mencapai sasaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan, yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit/laboratorium kesehatan di daerah, dengan memperhatikan menu dana Dekonsentrasi Tahun 2015.

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Program Bina Upaya Kesehatan (BUK)
 - a. Pertemuan konsultasi perencanaan dan monev program BUK antara Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan dinas kesehatan provinsi.
 - b. Pertemuan penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) tingkat provinsi dengan satker kabupaten/kota penerima APBN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- c. Pertemuan SAI (SAK dan SIMAK-BMN) Program BUK antara dinas kesehatan provinsi dengan satker di kabupaten/kota penerima APBN
 - d. Monev dan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Dinkes Provinsi ke satker kabupaten/kota penerima anggaran APBN.
 - e. Pertemuan pengelolaan sistem informasi manajemen RS
 - f. Pertemuan Penyusunan *e-planning* program BUK oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkes kabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkes lainnya di wilayah binaannya.
2. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Jiwa
 - a. Peningkatan ketrampilan kesehatan jiwa bagi Petugas kesehatan di puskesmas
 - b. Peningkatan keterampilan asesmen dan rencana terapi terkait Wajib Lapor Pecandu Narkotika
 - c. Peningkatan kapasitas dukungan psikologi awal (PFA) bagi petugas siaga bencana di tingkat provinsi/kab/kota
3. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Dasar
 - a. Peningkatan kemampuan teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD).
 - b. Kegiatan tim pelayanan kesehatan bergerak dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di Daerah tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
 - c. Workshop penguatan pembinaan manajemen puskesmas di dinas kesehatan kabupaten/kota.
 - d. Pelaksanaan pelatihan calon pendamping akreditasi fasyankes primer.
 - e. Workshop penguatan (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)).
 - f. Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 - g. Peningkatan kemampuan teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam mendukung MDG's.
 4. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Rujukan
 - a. *Workshop* Standar Akreditasi Baru/versi 2012.
 - b. *Improvement Colaborative* PONED-PONEK.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. Pengembangan Jejaring SPGDT - S Call Center 119
 - d. Pelatihan PPGD di Rumah Sakit
 - e. Pembentukan BPRS Provinsi.
 - f. Bimbingan Teknis Penyusunan SPM di Provinsi.
5. Kegiatan Pembinaan Keperawatan dan Keteknisian Medik
- a. Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
 - b. Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Anggaran Tugas Pembantuan Ditjen Bina Upaya Kesehatan bersumber dari APBN sebesar Rp.1.036.769.675.000,- dan bersumber APBN Perubahan sebesar Rp.2.029.290.000.000,- digunakan untuk kegiatan sebagai berikut;

A. Bersumber APBN

1. Menu Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - a. Pembangunan (pekerjaan konstruksi, perencana, pengawas, pengelola kegiatan) dan pengadaan peralatan rumah sakit Pratama dan rumah sakit bergerak;
 - b. Pengadaan sarana, prasarana dan peralatan penguatan rumah sakit rujukan nasional di RSUD Abdul Wahab syahrane (provinsi Kalimantan Timur) dan RSUD Dok II Jayapura (Provinsi Papua);
 - c. Pengadaan sarana, prasarana dan peralatan penguatan rumah sakit daerah
 - d. Pengadaan ambulan untuk penguatan SPGDT RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional.
2. Menu Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar
 - a. Pembangunan puskesmas bagi daerah pemekaran terutama di wilayah terpencil/sangat terpencil
 - b. Pembangunan rumah dinas dokter/tenaga kesehatan di wilayah terpencil/sangat terpencil
 - c. Peningkatan pustu menjadi puskesmas bagi daerah pemekaran terutama di wilayah terpencil/sangat terpencil
 - d. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap untuk daerah terpencil dan sangat terpencil



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- e. Peningkatan puskesmas rawat inap menjadi puskesmas mampu PONED pada kabupaten MDGs dengan jarak lebih dari 2 jam
- f. Rehabilitasi/renovasi Puskesmas rusak berat dan rusak sedang
- g. Pengadaan Kendaraan
 - Pusling double gardan bagi puskesmas dengan wilayah kerja luas dan medan jalan sulit
 - Ambulans untuk daerah rawan kecelakaan dan bencana
 - Pusling perairan bagi puskesmas dengan wilayah kerja yang sebagian besar hanya bias dijangkau transportasi air.
- h. Pengadaan alat kesehatan bagi puskesmas dengan alat kesehatan tidak lengkap dan tersedia tenaga yang berkompeten dan terlatih
 - Set Pemeriksaan Umum
 - PONED Set
 - Set Tindakan Medis/Gawat darurat
 - Set Kesehatan Gigi dan Mulut
 - Laboratorium Set
 - Set Promosi Kesehatan
 - Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Anak KB dan Imunisasi
- i. Pengadaan alat penunjang untuk daerah terpencil/sangat terpencil dan tidak ada listrik
 - Sollar Cell
 - Generator
 - Radio Komunikasi
- j. Khusus satker Dinkes Kab. Halmahera Barat (provinsi Maluku Utara) digunakan untuk membayar hutang pengadaan peralatan kesehatan dan ambulan yang belum terbayarkan melalui TP APBN 2014. Pembayaran hutang baru dapat dilaksanakan setelah ada hasil audit BPKP. Selanjutnya sisa anggaran dari pembayaran hutang dapat digunakan sesuai dengan menu diatas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

B. Bersumber APBN Perubahan

Menu Tugas Pembantuan APBN-P untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai berikut:

- a. Pengadaan saran prasarana dan peralatan penguatan rumah sakit rujukan nasional dan diutamakan untuk mendukung terwujudnya pelayanan unggulan subspesialis.
- b. Pengadaan sarana, prasarana dan peralatan penguatan rujukan regional dan provinsi sesuai usulan dengan prioritas penguatan pelayanan Instalasi Gawat darurat (IGD), Penguatan pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS) Pelayanan Intensive Care Unit (ICU), Penguatan Pelayanan Intensive Care Unit (ICCU), Penguatan Pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Penguatan Pelayanan Pediatric Intensive Care Unit (PICU) dan tempat tidur Klas III.
- c. Pengadaan ambulans untuk penguatan SPGDT RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional.

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT Rp. 503.074.168.000,- DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di daerah tahun 2015 disediakan dana sebesar Rp. 503.074.168.000,- yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 386.908.673.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 116.165.495.000 ,-

Anggaran Dekonsentrasi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dialokasikan untuk 6 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Rp. 93.015.138.000,-
2. Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Rp.61.066.482.000,-
3. Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 33.939.925.000,-
4. Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp. 111.866.100.000
5. Kegiatan Penyehatan Lingkungan Rp . 76.821.028.000,-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp.10.200.000.000,-

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra bersumber dari Rupiah Murni dialokasikan pada 34 provinsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Pembinaan Imunisasi melalui:

a. Imunisasi Rutin

- Koordinasi program Imunisasi
- Advokasi dan sosialisasi Program Imunisasi
- Monitoring dan evaluasi kegiatan Imunisasi bagi pengelola dan pelaksana
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

b. Introduksi Vaksin Baru

- Advokasi dan sosialisasi introduksi vaksin
- Pencetakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) introduksi vaksin
- Peningkatan kapasitas pelaksana Imunisasi

2. Pembinaan Surveilans melalui:

a. Investigasi dan Penanggulangan KLB

- Pelaksanaan rumors verifikasi
- Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi
- Koordinasi penanggulangan KLB
- Pengiriman logistik
- Pengambilan, pengiriman dan pemeriksaan spesimen dalam rangka KLB

b. Penguatan Kewapadaan Dini KLB Penyakit

- Sosialisasi kesiapsiagaan dan respon Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD)
- Replikasi SKD dan respon
- Peningkatan kapasitas Tim Gerak Cepat (TGC) di provinsi dan UPT
- Penemuan kasus penyakit potensial KLB
- Pengambilan, pengiriman dan pemeriksaan spesimen penyakit potensial KLB



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- c. Penemuan Kasus Discarded Campak
 - Penemuan kasus discarded campak
 - Operasional pengelolaan data PD3I tingkat provinsi
 - Bimbingan dan evaluasi
3. Pembinaan Karantina Kesehatan melalui:
 - Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)
 - Workshop Sistem Surveilans Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) Terintegrasi
4. Pembinaan Kesehatan Matra melalui:
 - Pemetaan Wilayah dengan Kondisi Matra
 - Peningkatan Kapasitas
 - Surveilans Kesehatan Matra
 - Bimbingan Teknis Program
 - Sosialisasi/Koordinasi Program Kesehatan Matra
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (PPBB) bersumber dari Rupiah Murni dialokasikan pada 34 provinsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Pengendalian Kasus Malaria Melalui :
 - a. Cakupan Penatalaksanaan Kasus Malaria Sesuai Standar
 - Peningkatan dan Penguatan Mutu Pengobatan dan Laboratorium Malaria
 - Koordinasi dan advokasi LS/LP, Kemitraan (Forum Gebrak Malaria Daerah) dan Kemandirian Masyarakat
 - Penguatan E - Sismal dan Surveilans migrasi dalam rangka cegah tangkal penularan malaria
 - Monitoring dan evaluasi P2 Malaria menuju eliminasi malaria
 - Assesment peningkatan kasus dan SKD KLB
 - Pedoman dan Media KIE Pengendalian Malaria
 - Peningkatan Kemampuan SDM Malaria di KTI dan daerah Fokus malaria dalam Akselerasi dan intensifikasi
 - Evaluasi pendistribusian dan penggunaan kelambu



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- Penguatan Kemandirian masyarakat dan Koordinasi Mitra Terkait
 - Penguatan Sistem Surveilans Malaria (E-Sismal)
 - Monitoring dan evaluasi P2 Malaria di KTI dan focus
- b. Cakupan Pendistribusian Kelambu
- Peningkatan dan Penguatan Mutu Pengobatan dan Laboratorium Malaria
 - Koordinasi dan advokasi LS/LP, Kemitraan (Forum Gebrak Malaria Daerah) dan Kemandirian Masyarakat
 - Penguatan E - Sismal dan Surveilans migrasi dalam rangka cegah tangkal penularan malaria
 - Monitoring dan evaluasi P2 Malaria menuju eliminasi malaria
 - Assesment peningkatan kasus dan SKD KLB
 - Pedoman dan Media KIE Pengendalian Malaria
 - Peningkatan Kemampuan SDM Malaria di KTI dan daerah Fokus malaria dalam Akselerasi dan intensifikasi
 - Evaluasi pendistribusian dan penggunaan kelambu
 - Penguatan Kemandirian masyarakat dan Koordinasi Mitra Terkait
 - Penguatan Sistem Surveilans Malaria (E-Sismal)
 - Monitoring dan evaluasi P2 Malaria di KTI dan focus
- c. Pengendalian Kasus Arbovirosis Melalui :
- Workshop petugas pengelola
 - Pertemuan/Pembentukan Pokjanel DBD tingkat provinsi
 - Monitoring/kewaspadaan dini KLB arbovirosis
 - Pengumpulan data dari kab/kota
 - Surveilans JE
 - Pelatihan bagi pengelola /dokter RS/Pusk/ jumantik
 - Evaluasi kinerja jumantik
 - Verifikasi data
 - Bimtek dan monev
 - Advokasi kepada Pemda tingkat Kota/Kab
2. Pengendalian Kasus suspect Flu Burung Melalui :
- Surveilans dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Flu Burung (pelacakan kasus/kewaspadaan dini KLB)
 - Advokasi pengendalian Penyakit Flu Burung



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

3. Pengendalian Kasus Rabies melalui :
 - Advokasi pengendalian Penyakit Rabies
 - Surveilans dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Rabies (pelacakan kasus/kewaspadaan dini KLB)
4. Pengendalian Kasus Leptospirosis melalui :
 - Surveilans dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Leptospirosis (pelacakan kasus/kewaspadaan dini KLB)
 - Advokasi pengendalian Penyakit Leptospirosis
5. Pengendalian Kasus Antraks Melalui :
 - Surveilans Dalam Rangka Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Antraks (pelacakan kasus/kewaspadaan dini KLB)
 - Advokasi pengendalian Penyakit Antraks
6. Pengendalian Kasus Pes Melalui :
 - Surveilans Dalam Rangka Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Pes (pelacakan kasus/kewaspadaan dini KLB)
 - Advokasi pengendalian Penyakit Pes
7. Pengendalian Vektor Melalui :
 - Sosialisasi Surveilans dan Pengendalian Vektor bagi Dinkes dan UPT
 - Pelaksanaan survei vektor (*mapping* vektor)
 - Pelatihan tenaga entomologi
 - Pelaksanaan kegiatan evaluasi efektifitas pengendalian vector
8. Pengendalian kasus Filariasis, Buski dan Kecacingan Melalui :
 - Kampanye POMP Filariasis menuju Eliminasi Filariasis
 - Advokasi/Sosialisasi di tingkat Kab/Kota pada pemangku kepentingan untuk mendapatkan komitmen penyediaan biaya operasional POMP
 - Koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota, dengan Puskesmas, Lintas Sektor dan Lintas Program terkait
 - Penguatan tenaga pelaksana pengendalian program filariasis tingkat kabupaten/kota
9. Pengendalian Schistosomiasis Melalui :
 - Monitoring prevalensi kasus schistosomiasis pada manusia
 - Koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota, dengan Puskesmas, Lintas Sektor dan Lintas Program terkait



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML) bersumber dari Rupiah Murni dialokasikan pada 34 provinsi untuk untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Pertemuan Evaluasi Kegiatan PPML
2. Pengendalian AIDS dan IMS
3. Pengendalian TB
4. Pengendalian Hepatitis, Diare dan Tifoid
5. Pengendalian Kusta dan Frambusia
6. Pengendalian ISPA
7. Bimbingan Teknis, Monitoring Evaluasi, dan Sosialisasi Kegiatan PPML

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular bersumber pembiayaan dari Rupiah Murni dialokasikan pada 34 provinsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
2. Pendampingan/advokasi pelaksanaan KTR ke kabupaten/kota
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTR ke kabupaten/kota
4. Pelaksanaan pertemuan jejaring kerja KTR
5. Advokasi dan sosialisasi upaya berhenti merokok
6. Pelatihan kab/kota dan fasyankes dalam upaya berhenti merokok
7. Pelatihan monitoring dan deteksi dini faktor risiko PTM pada kelompok masyarakat khusus
8. Pendampingan/advokasi pengendalian PTM ke kabupaten/kota
9. Monev dan bimtek serta sosialisasi Pengendalian PTM
10. Pelaksanaan pertemuan jejaring kerja/*workshop* pengendalian PTM
11. Pelaksanaan surveilans PTM
12. Deteksi dini dan monitoring faktor risiko PTM pada kelompok masyarakat khusus
13. Deteksi dini IVA, Papsmear dan CBE pada masyarakat
14. Pelatihan pengendalian PTM pada fasyankes primer



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

15. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengendalian PTM terintegrasi dan cedera di fasyankes primer
16. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam deteksi dini obesitas
17. Pendistribusian logistik pengendalian PTM

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Penyehatan Lingkungan bersumber pembiayaan dari Rupiah Murni dialokasikan pada 34 provinsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Peningkatan kemampuan tenaga teknis bidang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat melalui Pelatihan Monev STBM, Pelatihan Updating *Environmental Health Risk Assesment* (Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman *Second Cycle*)
2. Pembinaan terhadap kab/kota yang melaksanakan STBM melalui Pertemuan Advokasi Implementasi PPSP melalui pilar-pilar STBM, Pertemuan Koordinasi Jejaring STBM, Pembinaan Teknis STBM.
3. Tenaga terlatih bidang pengawasan kualitas air minum : Pelatihan Teknis Penyehatan Air, Pelatihan Rencana Pengamanan Air Minum
4. Pemetaan Kualitas Air Minum : Pertemuan Koordinasi Jejaring Pengawasan Kualitas Air Minum (dekon), Pembinaan Teknis PKAM (dekon)
5. Pembinaan terhadap Kawasan yang memenuhi syarat kesehatan : Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan kab/kota sehat, Dukungan pembinaan pasar sehat
6. Peningkatan kemampuan Tenaga Terlatih bidang penyehatan kawasan : Fasilitasi masyarakat peningkatan kesling di Daerah Tertinggal Perbatasan Kepulauan, Orientasi Fasilitator pemberdayaan masyarakat di DTPK, Orientasi fasilitator pasar sehat
7. Pembinaan terhadap Permukiman yang dilakukan pengawasan inspeksi sanitasi : Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi Rumah
8. Peningkatan kemampuan Tenaga terlatih Bidang Penyehatan Permukiman : Orientasi Klinik Sanitasi
9. Penyusunan Rencana Aksi Bidang Penyehatan Permukiman : Pelaksanaan Advokasi penyehatan perumahan di Propinsi
10. Peningkatan kemampuan Tenaga terlatih bidang TTU : Orientasi Pemantauan Kesling TTU



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

11. Penyusunan Rencana kerja bidang TTU : Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Lingkungan di Pondok Pesantren Peningkatan Kesling Sekolah
12. Peningkatan kemampuan Tenaga dan masyarakat terlatih Bidang APIK : Orientasi Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan bagi Petugas Kabupaten
13. Penyusunan Rencana kerja bidang Adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim : Advokasi dan Sosialisasi NSPK tentang Adaptasi Perubahan Iklim
14. Peningkatan kemampuan Tenaga terlatih bidang penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan : Implementasi Higiene Sanitasi Pangan di sekolah dan rumah tangga
15. Pembinaan terhadap capaian TPM memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten/kota : Fasilitasi, Monev dan Sosialisasi Pengembangan Sentra Makanan Jajanan, Evaluasi Kegiatan 2014 dan Penyiapan Kabupaten/Kota dalam Pembinaan dan Pengawasan Faktor Risiko TPM yang sesuai standar, Surveilans Kualitas TPM
16. Pembinaan terhadap capaian Rumah Sakit yang melaksanakan pengelolaan limbah medis : Jejaring kemitraan pengelolaan limbah medis, Pertemuan koordinasi pengelolaan limbah medis, Monev pengelolaan limbah fasyankes
17. Peningkatan kemampuan Tenaga terlatih bidang pengelolaan limbah : Orientasi Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes
18. Peningkatan kemampuan Tenaga terlatih Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan/ Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan : Pelatihan ADKL/ARKL.
19. Penerapan ADKL/ ARKL sesuai standar : Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Faktor Risiko Lingkungan di daerah

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Penyehatan Lingkungan bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui :

1. Perencanaan dan Anggaran Penyehatan Lingkungan melalui Penyusunan Rencana Kerja Program Pamsimas II Kesehatan di Pusat
2. Peningkatan kemampuan tenaga teknis bidang STBM melalui Pelatihan STBM Program Pamsimas II Kesehatan untuk Petugas Kecamatan/Desa



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

3. Pelaporan Keuangan dan BMN Penyehatan Lingkungan melalui Dukungan Sekretariat PAMSIMAS Komponen B
4. Evaluasi dan Pelaporan Penyehatan Lingkungan : Progress Manajemen Report PROGRAM PAMSIMAS II KESEHATAN di Pusat, Aktifitas *Community Lead Total Sanitation* Program PAMSIMAS II Kesehatan, Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun Program Pamsimas II Kesehatan, Kampanye Sanitasi dan Higiene Sekolah Program Pamsimas II Kesehatan, Surveilans Kualitas Air Program Pamsimas II Kesehatan, Fasilitasi Implementasi di desa Program Pamsimas II Kesehatan, monitoring dan evaluasi oleh petugas Provinsi Program Pamsimas II Kesehatan

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya bersumber pembiayaan dari Rupiah Murni, dialokasikan pada 34 provinsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan penyusunan *E-Planning*.
2. Penyusunan dokumen RKA-KL
3. Pembahasan, penajaman, dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan penganggaran
4. Penyusunan profil, buku situasi dan kecenderungan penyakit serta media KIE program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
5. Penyusunan laporan pelaksanaan program PP dan PL, Laporan PP 39 dan Laporan Tahunan
6. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN)
7. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker, Rekonsiliasi Anggaran Satker dengan Kementerian Keuangan, Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran
8. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana Tingkat satker dan perubahannya
9. Penyediaan honorarium dan operasional dalam rangka pengelolaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan bersumber Rupiah Murni dialokasikan untuk kegiatan Penyehatan Lingkungan sebesar Rp. 116.165.495.000,-

Anggaran tersebut dialokasikan pada 116 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi dengan lingkup kegiatan terdiri atas:

1. Kegiatan Fisik Pembangunan Kontruksi Sarana Air Minum untuk :
 - Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna Sarana Air Minum.
 - Fasilitasi Perbaikan Sarana Sanitasi, dan Perubahan Perilaku di Pondok Pesantren.
 - Pembangunan Sarana Perubahan Perilaku dan Sarana Air Bersih Kesehatan Lingkungan di DTPK.
2. Pelaksanaan peningkatan akses air minum melalui kegiatan pertemuan sosialisasi tugas pembantuan direktorat penyehatan lingkungan, dan surveilans sarana air minum dan sanitasi dasar untuk : pengumpulan data dan sarana, penggandaan formulir Inspeksi Sanitasi (IS), pengolahan data dan pelaporan, pembinaan dan monitoring pelaksanaan ttg sarana air minum.
3. Pelaksanaan pengawasan kualitas air melalui kegiatan surveilans kualitas air dan penyehatan lingkungan.
4. Pelaksanaan penyehatan kawasan sanitasi darurat melalui kegiatan fasilitasi masyarakat di kawasan DTPK dalam pendampingan penyusunan RKM, peyusunan RKM (rencana kerja masyarakat).
5. Pelaksanaan Kegiatan Penyehatan Tempat-Tempat Umum melalui kegiatan Fasilitasi Penyehatan Lingkungan di Pondok Pesantren dengan tahapan Penjaringan Lokasi Sasaran, Fasilitasi Masyarakat Pontren serta Monitoring dan Evaluasi Kesling di Pontren.
6. Pelaksanaan STBM melalui kegitaan pemicuan desa STBM dan pertemuan teknis tugas pembantuan dan STBM nasional.
7. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sentra Makanan Jajanan melalui pelatihan penjamah makanan dan peningkatan sarana sanitasi di sentra makanan jajanan
8. Pelaksanaan pengelolaan manajemen program penyehatan lingkungan untuk operasional pembiayaan pengelolaan satker dinkes kabupaten tugas pembantuan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

9. Penyusunan laporan keuangan dan BMN melalui kegiatan perjalanan penyusunan laporan konsolidasi keuangan/SAI di provinsi.

V. PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Rp. 57.897.000.000

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah tahun 2014 disediakan dana dekonsentrasi sebesar Rp.57.897.000.000,-.

Kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi utamanya (Menu Wajib), untuk:

1. Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian
3. Advokasi Pelaksanaan SAI Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes TK Provinsi-Profil Kefarmasian
5. Biaya Pengelolaan dan Pengemasan kembali obat
6. Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin
7. Harmonisasi dan Integrasi Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan Implementasi Pengelolaan Obat Satu Pintu (*One Gate Policy*)
8. Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian dalam Pelayanan Kesehatan pada era JKN
9. Pemantauan penggunaan obat dalam pelaksanaan JKN di Puskesmas dan RS
10. Sampling Produk Alkes dan PKRT
11. Peningkatan Kemampuan SDM dalam Implementasi Sistem Elektronik pada Binwasdal Alat Kesehatan dan PKRT
12. Sosialisasi e-licensing bagi Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, PBF, Industri Kosmetik/Makanan
13. Pembekalan CDOB untuk Tenaga Kesehatan dan Penanggungjawab Teknis Sarana Distribusi Obat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Di samping itu, terdapat menu tambahan yang dapat dipilih apabila kegiatan pada menu wajib telah terakomodir atau telah tersedia anggaran pada APBD (Menu Pilihan), antara lain:

1. Penerapan *e-logistic* dan *e-catalog*
2. Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Pengelolaan Vaksin Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan Obat Rasional dengan metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)
4. Advokasi Implementasi FORNAS kepada *Stakeholder* dan Prescriber di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah
5. Monitoring dan Evaluasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT
6. Monitoring dan Evaluasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan
7. Sosialisasi e-report PBF
8. Penerapan Pengembangan *Software* Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika
9. Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/66/2015
TENTANG
ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI
UNTUK MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2015

I PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

| NO | SATUAN KERJA | RUPIAH MURNI | RM PENDAMPING | PHLN | JUMLAH |
|----|--|------------------------|---------------|------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | 5,373,104,000 | | | 5,373,104,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat | 11,893,585,000 | | | 11,893,585,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | 12,768,738,000 | | | 12,768,738,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta | 4,378,107,000 | | | 4,378,107,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur | 14,147,462,000 | | | 14,147,462,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Provinsi Aceh | 10,850,975,000 | | | 10,850,975,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | 12,661,184,000 | | | 12,661,184,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat | 7,682,431,000 | | | 7,682,431,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Provinsi Riau | 5,775,596,000 | | | 5,775,596,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | 5,311,371,000 | | | 5,311,371,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | 7,123,481,000 | | | 7,123,481,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | 7,946,443,000 | | | 7,946,443,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat | 6,023,666,000 | | | 6,023,666,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan | 7,089,539,000 | | | 7,089,539,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah | 5,998,601,000 | | | 5,998,601,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur | 5,747,420,000 | | | 5,747,420,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | 12,154,999,000 | | | 12,154,999,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 6,294,984,000 | | | 6,294,984,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara | 7,088,554,000 | | | 7,088,554,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara | 6,972,556,000 | | | 6,972,556,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku | 7,507,922,000 | | | 7,507,922,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | 6,268,320,000 | | | 6,268,320,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat | 9,516,685,000 | | | 9,516,685,000 |
| 24 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 5,851,855,000 | | | 5,851,855,000 |
| 25 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua | 16,092,955,000 | | | 16,092,955,000 |
| 26 | Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu | 5,460,360,000 | | | 5,460,360,000 |
| 27 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara | 7,020,677,000 | | | 7,020,677,000 |
| 28 | Dinas Kesehatan Provinsi Banten | 5,068,355,000 | | | 5,068,355,000 |
| 29 | Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung | 5,068,361,000 | | | 5,068,361,000 |
| 30 | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo | 5,685,846,000 | | | 5,685,846,000 |
| 31 | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau | 5,266,031,000 | | | 5,266,031,000 |
| 32 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat | 9,007,444,000 | | | 9,007,444,000 |
| 33 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat | 4,903,511,000 | | | 4,903,511,000 |
| 34 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara | 3,805,182,000 | | | 3,805,182,000 |
| | JUMLAH: | 259,806,300,000 | - | - | 259,806,300,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | RUPIAH MURNI | RM PENDAMPING | PHLN | JUMLAH |
|----------------|--|------------------------|---------------|------|------------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | 11,275,478,000 | | - | 11,275,478,000 |
| 02 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat | 35,891,110,000 | | - | 35,891,110,000 |
| 03 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | 37,024,137,000 | | - | 37,024,137,000 |
| 04 | Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta | 11,940,462,000 | | - | 11,940,462,000 |
| 05 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur | 60,472,567,000 | | - | 60,472,567,000 |
| 06 | Dinas Kesehatan Provinsi Aceh | 20,344,762,000 | | - | 20,344,762,000 |
| 07 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | 30,486,948,000 | | - | 30,486,948,000 |
| 08 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat | 17,971,153,000 | | - | 17,971,153,000 |
| 09 | Dinas Kesehatan Provinsi Riau | 14,424,828,000 | | - | 14,424,828,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | 12,509,174,000 | | - | 12,509,174,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | 18,262,436,000 | | - | 18,262,436,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | 19,582,334,000 | | - | 19,582,334,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat | 15,985,680,000 | | - | 15,985,680,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah | 18,251,429,000 | | - | 18,251,429,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan | 19,721,394,000 | | - | 19,721,394,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur | 12,458,164,000 | | - | 12,458,164,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara | 21,114,600,000 | | - | 21,114,600,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 19,865,542,000 | | - | 19,865,542,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | 31,266,606,000 | | - | 31,266,606,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara | 15,846,858,000 | | - | 15,846,858,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku | 18,272,445,000 | | - | 18,272,445,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | 14,704,062,000 | | - | 14,704,062,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat | 16,887,485,000 | | - | 16,887,485,000 |
| 24 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 19,806,381,000 | | - | 19,806,381,000 |
| 25 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua | 27,823,608,000 | | - | 27,823,608,000 |
| 26 | Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu | 13,805,649,000 | | - | 13,805,649,000 |
| 27 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara | 12,743,708,000 | | - | 12,743,708,000 |
| 28 | Dinas Kesehatan Provinsi Banten | 16,818,349,000 | | - | 16,818,349,000 |
| 29 | Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung | 10,767,813,000 | | - | 10,767,813,000 |
| 30 | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo | 10,497,788,000 | | - | 10,497,788,000 |
| 31 | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau | 10,447,370,000 | | - | 10,447,370,000 |
| 32 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat | 14,847,952,000 | | - | 14,847,952,000 |
| 33 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat | 10,553,545,000 | | - | 10,553,545,000 |
| 34 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara | 6,066,105,000 | | - | 6,066,105,000 |
| JUMLAH: | | 648,737,922,000 | - | - | 648,737,922,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

| No | SATUAN KERJA | RUPIAH MURNI | RM PENDAMPING | PHLN | JUMLAH |
|----|--|------------------------|---------------|------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | 719,970,000 | | | 719,970,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat | 3,824,538,845 | | | 3,824,538,845 |
| 3 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | 7,201,535,634 | | | 7,201,535,634 |
| 4 | Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta | 2,171,062,458 | | | 2,171,062,458 |
| 5 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur | 4,668,479,661 | | | 4,668,479,661 |
| 6 | Dinas Kesehatan Provinsi Aceh | 5,501,168,004 | | | 5,501,168,004 |
| 7 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | 6,318,959,088 | | | 6,318,959,088 |
| 8 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat | 4,277,730,443 | | | 4,277,730,443 |
| 9 | Dinas Kesehatan Provinsi Riau | 3,029,809,248 | | | 3,029,809,248 |
| 10 | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | 4,657,106,266 | | | 4,657,106,266 |
| 11 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | 3,923,136,181 | | | 3,923,136,181 |
| 12 | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | 4,467,899,587 | | | 4,467,899,587 |
| 13 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat | 5,956,420,441 | | | 5,956,420,441 |
| 14 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan | 1,611,027,450 | | | 1,611,027,450 |
| 15 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah | 2,001,572,279 | | | 2,001,572,279 |
| 16 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur | 2,889,971,892 | | | 2,889,971,892 |
| 17 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | 6,748,682,433 | | | 6,748,682,433 |
| 18 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 4,338,859,366 | | | 4,338,859,366 |
| 19 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara | 4,097,682,632 | | | 4,097,682,632 |
| 20 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara | 6,195,084,676 | | | 6,195,084,676 |
| 21 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku | 5,711,905,645 | | | 5,711,905,645 |
| 22 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | 2,168,692,720 | | | 2,168,692,720 |
| 23 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3,083,639,264 | | | 3,083,639,264 |
| 24 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 6,465,577,149 | | | 6,465,577,149 |
| 25 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua | 3,203,823,913 | | | 3,203,823,913 |
| 26 | Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu | 5,133,227,353 | | | 5,133,227,353 |
| 27 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara | 5,834,225,726 | | | 5,834,225,726 |
| 28 | Dinas Kesehatan Provinsi Banten | 3,349,214,199 | | | 3,349,214,199 |
| 29 | Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung | 2,787,985,849 | | | 2,787,985,849 |
| 30 | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo | 3,084,037,178 | | | 3,084,037,178 |
| 31 | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau | 2,650,797,004 | | | 2,650,797,004 |
| 32 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat | 8,610,408,997 | | | 8,610,408,997 |
| 33 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat | 3,838,667,024 | | | 3,838,667,024 |
| 34 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara | 967,548,397 | | | 967,548,397 |
| | JUMLAH: | 141,490,447,000 | - | - | 141,490,447,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

| NO | SATUAN KERJA | RUPIAH MURNI | RM PENDAMPING | PHLN | JUMLAH |
|----------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | 8,282,148,000 | - | - | 8,282,148,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat | 18,764,608,000 | 738,600,000 | 289,088,000 | 19,792,296,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | 22,734,473,000 | 1,718,424,000 | 567,956,000 | 25,020,853,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta | 6,914,186,000 | 161,116,000 | 64,611,000 | 7,139,913,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur | 16,353,872,000 | 1,277,728,000 | 474,200,000 | 18,105,800,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Provinsi Aceh | 10,547,650,000 | 223,084,000 | 81,184,000 | 10,851,918,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | 13,446,495,000 | 292,380,000 | 96,696,000 | 13,835,571,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat | 11,869,185,000 | 903,564,000 | 394,292,000 | 13,167,041,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Provinsi Riau | 7,465,231,000 | 761,772,000 | 248,006,000 | 8,475,009,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | 9,593,191,000 | 269,700,000 | 96,296,000 | 9,959,187,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | 9,090,570,000 | 728,876,000 | 284,720,000 | 10,104,166,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | 11,409,776,000 | 181,546,000 | 80,953,000 | 11,672,275,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat | 15,839,895,000 | 670,522,000 | 227,110,000 | 16,737,527,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan | 9,255,507,000 | 558,690,000 | 185,402,000 | 9,999,599,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah | 9,293,000,000 | 223,978,000 | 85,023,000 | 9,602,001,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur | 10,118,576,000 | 99,784,000 | 43,955,000 | 10,262,315,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | 10,884,156,000 | 1,016,708,000 | 379,460,000 | 12,280,324,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 10,700,102,000 | 693,526,000 | 285,029,000 | 11,678,657,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara | 10,383,446,000 | 265,984,000 | 89,911,000 | 10,739,341,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara | 8,665,733,000 | 154,424,000 | 61,371,000 | 8,881,528,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku | 13,080,103,000 | 477,442,000 | 265,300,000 | 13,822,845,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | 9,921,702,000 | 96,714,000 | 46,208,000 | 10,064,624,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat | 8,632,228,000 | 399,900,000 | 127,982,000 | 9,160,110,000 |
| 24 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 17,360,954,000 | 1,398,590,000 | 561,176,000 | 19,320,720,000 |
| 25 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua | 15,788,440,000 | 161,326,000 | 52,643,000 | 16,002,409,000 |
| 26 | Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu | 7,548,635,000 | 282,482,000 | 100,916,000 | 7,932,033,000 |
| 27 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara | 11,404,200,000 | 92,820,000 | 44,890,000 | 11,541,910,000 |
| 28 | Dinas Kesehatan Provinsi Banten | 8,782,621,000 | 230,370,000 | 89,564,000 | 9,102,555,000 |
| 29 | Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung | 7,907,955,000 | 161,608,000 | 67,256,000 | 8,136,819,000 |
| 30 | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo | 5,761,769,000 | 259,068,000 | 88,220,000 | 6,109,057,000 |
| 31 | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau | 6,781,809,000 | 191,856,000 | 116,043,000 | 7,089,708,000 |
| 32 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat | 12,300,559,000 | 269,236,000 | 172,148,000 | 12,741,943,000 |
| 33 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat | 6,359,813,000 | 167,840,000 | 63,110,000 | 6,590,763,000 |
| 34 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara | 2,705,708,000 | | | 2,705,708,000 |
| JUMLAH: | | 365,948,296,000 | 15,129,658,000 | 5,830,719,000 | 386,908,673,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

V PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

| NO | SATUAN KERJA | RUPIAH MURNI | RM PENDAMPING | PHLN | JUMLAH |
|----------------|--|-----------------------|---------------|------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | 1,838,131,000 | | | 1,838,131,000 |
| 02 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat | 2,631,152,000 | | | 2,631,152,000 |
| 03 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | 2,581,274,000 | | | 2,581,274,000 |
| 04 | Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta | 1,336,277,000 | | | 1,336,277,000 |
| 05 | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur | 2,772,754,000 | | | 2,772,754,000 |
| 06 | Dinas Kesehatan Provinsi Aceh | 1,974,096,000 | | | 1,974,096,000 |
| 07 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | 2,338,608,000 | | | 2,338,608,000 |
| 08 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat | 1,830,797,000 | | | 1,830,797,000 |
| 09 | Dinas Kesehatan Provinsi Riau | 1,567,366,000 | | | 1,567,366,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | 1,510,038,000 | | | 1,510,038,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | 1,623,506,000 | | | 1,623,506,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | 1,609,008,000 | | | 1,609,008,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat | 1,604,470,000 | | | 1,604,470,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah | 1,598,240,000 | | | 1,598,240,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan | 1,679,709,000 | | | 1,679,709,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur | 1,488,356,000 | | | 1,488,356,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara | 1,666,089,000 | | | 1,666,089,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 1,533,662,000 | | | 1,533,662,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | 2,026,448,000 | | | 2,026,448,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara | 1,559,342,000 | | | 1,559,342,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku | 1,534,299,000 | | | 1,534,299,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | 1,495,607,000 | | | 1,495,607,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1,450,910,000 | | | 1,450,910,000 |
| 24 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1,850,741,000 | | | 1,850,741,000 |
| 25 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua | 2,245,104,000 | | | 2,245,104,000 |
| 26 | Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu | 1,461,973,000 | | | 1,461,973,000 |
| 27 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara | 1,454,150,000 | | | 1,454,150,000 |
| 28 | Dinas Kesehatan Provinsi Banten | 1,495,467,000 | | | 1,495,467,000 |
| 29 | Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung | 1,353,430,000 | | | 1,353,430,000 |
| 30 | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo | 1,338,851,000 | | | 1,338,851,000 |
| 31 | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau | 1,297,332,000 | | | 1,297,332,000 |
| 32 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat | 1,801,589,000 | | | 1,801,589,000 |
| 33 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat | 1,268,214,000 | | | 1,268,214,000 |
| 34 | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara | 1,080,010,000 | | | 1,080,010,000 |
| JUMLAH: | | 57,897,000,000 | - | - | 57,897,000,000 |

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/66/2015
TENTANG
TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2015

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
UNTUK MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

I PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

| NO | SATUAN KERJA | RUPIAH MURNI | RM PENDAMPING | PHLN | JUMLAH |
|----|---|---------------|---------------|------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dinas Kesehatan Kab. Garut | 1,243,442,000 | | | 1,243,442,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kab. Kuningan | 1,243,442,000 | | | 1,243,442,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kab. Cirebon | 1,243,442,000 | | | 1,243,442,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kab. Sumedang | 1,243,442,000 | | | 1,243,442,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kab. Ciamis | 1,243,442,000 | | | 1,243,442,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kota Bogor | 706,584,000 | | | 706,584,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kota Bandung | 702,230,000 | | | 702,230,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kota Depok | 706,584,000 | | | 706,584,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kab. Karawang | 706,584,000 | | | 706,584,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kab. Jepara | 334,305,000 | | | 334,305,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kab. Magelang | 1,039,915,000 | | | 1,039,915,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kab. Kebumen | 334,305,000 | | | 334,305,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kab. Pemasang | 930,130,000 | | | 930,130,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kab. Banyumas | 930,130,000 | | | 930,130,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Kab. Batang | 930,130,000 | | | 930,130,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Kota Probolinggo | 706,260,000 | | | 706,260,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Kab. Jombang | 706,260,000 | | | 706,260,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso | 1,248,898,000 | | | 1,248,898,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Kab. Situbondo | 1,248,898,000 | | | 1,248,898,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan | 1,248,898,000 | | | 1,248,898,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Kab. Bangkalan | 1,248,898,000 | | | 1,248,898,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Kab. Ngawi | 1,248,898,000 | | | 1,248,898,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan Kab. Pacitan | 1,248,898,000 | | | 1,248,898,000 |
| 24 | Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo | 1,248,898,000 | | | 1,248,898,000 |
| 25 | Dinas Kesehatan Kab. Aceh Utara | 1,314,794,000 | | | 1,314,794,000 |
| 26 | Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur | 1,032,849,000 | | | 1,032,849,000 |
| 27 | Dinas Kesehatan Kab. Bireun | 1,032,849,000 | | | 1,032,849,000 |
| 28 | Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tenggara | 1,032,849,000 | | | 1,032,849,000 |
| 29 | Dinas Kesehatan Kab. Pidie | 281,945,000 | | | 281,945,000 |
| 30 | Dinas Kesehatan Kab. Aceh Besar | 281,945,000 | | | 281,945,000 |
| 31 | Dinas Kesehatan Kab. Simalungun | 1,335,227,000 | | | 1,335,227,000 |
| 32 | Dinas Kesehatan Kab. Samosir | 279,325,000 | | | 279,325,000 |
| 33 | Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal | 1,055,902,000 | | | 1,055,902,000 |
| 34 | Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu | 1,055,902,000 | | | 1,055,902,000 |
| 35 | Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara | 1,055,902,000 | | | 1,055,902,000 |
| 36 | Dinas Kesehatan Kota Medan | 700,830,000 | | | 700,830,000 |
| 37 | Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar | 276,270,000 | | | 276,270,000 |
| 38 | Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan | 1,596,718,000 | | | 1,596,718,000 |
| 39 | Dinas Kesehatan Kab. Agam | 276,270,000 | | | 276,270,000 |
| 40 | Dinas Kesehatan Kab. Dharmas Raya | 1,046,078,000 | | | 1,046,078,000 |
| 41 | Dinas Kesehatan Kab. Sijunjung | 274,370,000 | | | 274,370,000 |
| 42 | Dinas Kesehatan Kota Solok | 702,330,000 | | | 702,330,000 |
| 43 | Dinas Kesehatan Kab. Pasaman | 1,046,078,000 | | | 1,046,078,000 |
| 44 | Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat | 1,046,078,000 | | | 1,046,078,000 |
| 45 | Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur | 1,343,910,000 | | | 1,343,910,000 |
| 46 | Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat | 1,618,751,000 | | | 1,618,751,000 |
| 47 | Dinas Kesehatan Kab. Bungo | 1,343,910,000 | | | 1,343,910,000 |
| 48 | Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun | 1,343,910,000 | | | 1,343,910,000 |
| 49 | Dinas Kesehatan Kab. Muaro Jambi | 1,618,751,000 | | | 1,618,751,000 |
| 50 | Dinas Kesehatan Kab. Batanghari | 1,343,910,000 | | | 1,343,910,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

I PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

| NO | SATUAN KERJA | RUPIAH MURNI | RM PENDAMPING | PHLN | JUMLAH |
|-----|---|------------------------|---------------|------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | Dinas Kesehatan Kab. Marangin | 274,841,000 | | | 274,841,000 |
| 52 | Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang | 702,330,000 | | | 702,330,000 |
| 53 | Dinas Kesehatan Kab. Lingga | 1,103,005,000 | | | 1,103,005,000 |
| 54 | Dinas Kesehatan Kab. Bintan | 1,103,005,000 | | | 1,103,005,000 |
| 55 | Dinas Kesehatan Kota Metro | 704,478,000 | | | 704,478,000 |
| 56 | Dinas Kesehatan Kab. Mesuji | 948,596,000 | | | 948,596,000 |
| 57 | Dinas Kesehatan Kab. Gunung Kidul | 704,270,000 | | | 704,270,000 |
| 58 | Dinas Kesehatan Kab. Kapuas | 1,340,860,000 | | | 1,340,860,000 |
| 59 | Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan | 1,340,860,000 | | | 1,340,860,000 |
| 60 | Dinas Kesehatan Kab. Kota Waringin Barat | 1,340,860,000 | | | 1,340,860,000 |
| 61 | Dinas Kesehatan Kab. Kota Waringin Timur | 1,340,860,000 | | | 1,340,860,000 |
| 62 | Dinas Kesehatan Kab. Banjar | 277,255,000 | | | 277,255,000 |
| 63 | Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah | 1,039,187,000 | | | 1,039,187,000 |
| 64 | Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala | 1,039,187,000 | | | 1,039,187,000 |
| 65 | Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara | 277,255,000 | | | 277,255,000 |
| 66 | Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan | 277,255,000 | | | 277,255,000 |
| 67 | Dinas Kesehatan Kab. Tapin | 1,039,187,000 | | | 1,039,187,000 |
| 68 | Dinas Kesehatan Kab. Balangan | 1,039,187,000 | | | 1,039,187,000 |
| 69 | Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya | 277,255,000 | | | 277,255,000 |
| 70 | Dinas Kesehatan Kab. Ketapang | 1,627,207,000 | | | 1,627,207,000 |
| 71 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | 277,255,000 | | | 277,255,000 |
| 72 | Dinas Kesehatan Kab. Sambas | 1,349,952,000 | | | 1,349,952,000 |
| 73 | Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu | 1,349,952,000 | | | 1,349,952,000 |
| 74 | Dinas Kesehatan Kab. Landak | 1,349,952,000 | | | 1,349,952,000 |
| 75 | Dinas Kesehatan Kab. Pontianak | 1,349,952,000 | | | 1,349,952,000 |
| 76 | Dinas Kesehatan Kab. Donggala | 1,347,140,000 | | | 1,347,140,000 |
| 77 | Dinas Kesehatan Kab. Sigi | 1,347,140,000 | | | 1,347,140,000 |
| 78 | Dinas Kesehatan Kab. Parigi Moutong | 721,231,000 | | | 721,231,000 |
| 79 | Dinas Kesehatan Kota Manado | 703,190,000 | | | 703,190,000 |
| 80 | Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondo Timur | 1,054,704,000 | | | 1,054,704,000 |
| 81 | Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara | 1,054,704,000 | | | 1,054,704,000 |
| 82 | Dinas Kesehatan Kab. Luwu | 1,620,087,000 | | | 1,620,087,000 |
| 83 | Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto | 1,339,752,000 | | | 1,339,752,000 |
| 84 | Dinas Kesehatan Kab. Maros | 280,335,000 | | | 280,335,000 |
| 85 | Dinas Kesehatan Kota Makasar | 280,335,000 | | | 280,335,000 |
| 86 | Dinas Kesehatan Kab. Enrekang | 1,339,752,000 | | | 1,339,752,000 |
| 87 | Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara | 1,339,752,000 | | | 1,339,752,000 |
| 88 | Dinas Kesehatan Kab. Sidenreng Rappang | 740,054,000 | | | 740,054,000 |
| 89 | Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat | 1,270,088,000 | | | 1,270,088,000 |
| 90 | Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah | 1,270,088,000 | | | 1,270,088,000 |
| 91 | Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur | 1,270,088,000 | | | 1,270,088,000 |
| 92 | Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara | 1,270,088,000 | | | 1,270,088,000 |
| 93 | Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa | 1,270,088,000 | | | 1,270,088,000 |
| 94 | Dinas Kesehatan Kab. Dompu | 1,270,088,000 | | | 1,270,088,000 |
| 95 | Dinas Kesehatan Kab. Bima | 1,270,088,000 | | | 1,270,088,000 |
| 96 | Dinas Kesehatan Kab. Sorong | 1,425,001,000 | | | 1,425,001,000 |
| 97 | Dinas Kesehatan Kab. Fakfak | 1,425,001,000 | | | 1,425,001,000 |
| 98 | Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar | 1,376,872,000 | | | 1,376,872,000 |
| 99 | Dinas Kesehatan Kab. Mamasa | 1,376,872,000 | | | 1,376,872,000 |
| 100 | Dinas Kesehatan Kab. Majene | 1,376,872,000 | | | 1,376,872,000 |
| 101 | Dinas Kesehatan Kab. Konawe | 279,850,000 | | | 279,850,000 |
| 102 | Dinas Kesehatan Kab. Konawe Selatan | 2,483,290,000 | | | 2,483,290,000 |
| 103 | Dinas Kesehatan Kab. Kolaka | 279,850,000 | | | 279,850,000 |
| 104 | Dinas Kesehatan Kab. Muna | 2,096,610,000 | | | 2,096,610,000 |
| 105 | Dinas Kesehatan Kab. Muko-Muko | 274,841,000 | | | 274,841,000 |
| 106 | Dinas Kesehatan Kota Bengkulu | 983,179,000 | | | 983,179,000 |
| 107 | Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong | 274,841,000 | | | 274,841,000 |
| 108 | Dinas Kesehatan Kab. Pandeglang | 332,054,000 | | | 332,054,000 |
| 109 | Dinas Kesehatan Kab. Lebak | 332,054,000 | | | 332,054,000 |
| 110 | Dinas Kesehatan Kab. Tangerang | 332,054,000 | | | 332,054,000 |
| 111 | Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Aru | 814,640,000 | | | 814,640,000 |
| 112 | Dinas Kesehatan Kab. Maluku Tenggara Barat | 814,640,000 | | | 814,640,000 |
| 113 | Dinas Kesehatan Kab. Manggarai | 1,028,843,000 | | | 1,028,843,000 |
| 114 | Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir | 1,431,590,000 | | | 1,431,590,000 |
| 115 | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | 1,431,590,000 | | | 1,431,590,000 |
| 116 | Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu | 1,431,590,000 | | | 1,431,590,000 |
| | Jumlah | 116,165,495,000 | - | - | 116,165,495,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
A. BERSUMBER APBN

| NO | PROVINSI KABUPATEN/KOTA | RM | | ALOKASI |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | PELAYANAN DASAR | PELAYANAN RUJUKAN | |
| I | ACEH | 48,681,000,000 | - | 48,681,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Aceh Singkil | 3,401,000,000 | - | 3,401,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Aceh Selatan | 3,100,000,000 | - | 3,100,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Aceh Tenggara | 2,250,000,000 | - | 2,250,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Aceh Timur | 4,350,000,000 | - | 4,350,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Aceh Barat | 4,100,000,000 | - | 4,100,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Aceh Besar | 3,500,000,000 | - | 3,500,000,000 |
| 7 | Dinkes Kab. Aceh Barat Daya | 3,500,000,000 | - | 3,500,000,000 |
| 8 | Dinkes Kab. Gayo Lues | 4,000,000,000 | - | 4,000,000,000 |
| 9 | Dinkes Kab. Aceh Tamiang | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 |
| 10 | Dinkes Kab. Nagan Raya | 3,950,000,000 | - | 3,950,000,000 |
| 11 | Dinkes Kab. Aceh Jaya | 2,700,000,000 | - | 2,700,000,000 |
| 12 | Dinkes Kab. Bener Meriah | 4,000,000,000 | - | 4,000,000,000 |
| 13 | Dinkes Kab. Pidie Jaya | 4,350,000,000 | - | 4,350,000,000 |
| 14 | Dinkes Kota Banda Aceh | 3,480,000,000 | - | 3,480,000,000 |
| II | SUMATERA UTARA | 7,580,588,000 | - | 7,580,588,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Karo | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Pakpak Barat | 1,291,000,000 | - | 1,291,000,000 |
| 3 | Dinkes Kota Sibolga | 3,289,588,000 | - | 3,289,588,000 |
| III | SUMATERA BARAT | 35,382,900,000 | - | 35,382,900,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Kepulauan Mentawai | 3,200,000,000 | - | 3,200,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Pesisir Selatan | 3,450,000,000 | - | 3,450,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Solok | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Sijunjung | 3,450,000,000 | - | 3,450,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Padang Pariaman | 4,460,000,000 | - | 4,460,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Solok Selatan | 3,400,000,000 | - | 3,400,000,000 |
| 7 | Dinkes Kab. Dharmas Raya | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| 8 | Dinkes Kab. Pasaman Barat | 3,600,000,000 | - | 3,600,000,000 |
| 9 | Dinkes Kota Padang | 3,800,000,000 | - | 3,800,000,000 |
| 10 | Dinkes Kota Sawah Lunto | 2,522,900,000 | - | 2,522,900,000 |
| IV | RIAU | 9,961,482,000 | - | 9,961,482,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Bengkalis | 1,600,000,000 | - | 1,600,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Rokan Hilir | 3,911,482,000 | - | 3,911,482,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Kepulauan Meranti | 4,450,000,000 | - | 4,450,000,000 |
| V | JAMBI | 3,400,000,000 | - | 3,400,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Tanjung Jabung Timur | 3,400,000,000 | - | 3,400,000,000 |
| VI | SUMATERA SELATAN | 22,050,000,000 | 21,531,198,000 | 43,581,198,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Ogan Komering Ulu | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Ogan Komering Ilir | 2,500,000,000 | 21,531,198,000 | 24,031,198,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Muara Enim | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Lahat | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Banyu Asin | 4,400,000,000 | - | 4,400,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Ogan Ilir | 4,150,000,000 | - | 4,150,000,000 |
| 7 | Dinkes Kab. Empat Lawang | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

A. BERSUMBER APBN

| | | | | |
|-------------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| VII | BENGKULU | 26,320,000,000 | - | 26,320,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Bengkulu Selatan | 4,750,000,000 | - | 4,750,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Bengkulu Utara | 4,750,000,000 | - | 4,750,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Seluma | 3,960,000,000 | - | 3,960,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Mukomuko | 4,760,000,000 | - | 4,760,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Lebong | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Bengkulu Tengah | 3,600,000,000 | - | 3,600,000,000 |
| VIII | LAMPUNG | 5,724,480,000 | - | 5,724,480,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Lampung Utara | 1,974,480,000 | - | 1,974,480,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Pesawaran | 3,750,000,000 | - | 3,750,000,000 |
| IX | BANGKA BELITUNG | 18,178,128,000 | - | 18,178,128,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Bangka | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Belitung | 2,725,242,000 | - | 2,725,242,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Bangka Barat | 4,115,000,000 | - | 4,115,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Bangka Tengah | 3,575,000,000 | - | 3,575,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Bangka Selatan | 3,672,886,000 | - | 3,672,886,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Belitung Timur | 1,090,000,000 | - | 1,090,000,000 |
| X | KEP RIAU | 16,718,000,000 | - | 16,718,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Karimun | 4,750,000,000 | - | 4,750,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Bintan | 3,200,000,000 | - | 3,200,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Natuna | 4,118,000,000 | - | 4,118,000,000 |
| 4 | Dinkes Kota Batam | 4,650,000,000 | - | 4,650,000,000 |
| XI | DKI JAKARTA | - | - | - |
| XII | JAWA BARAT | 12,700,000,000 | - | 12,700,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Sukabumi | 4,850,000,000 | - | 4,850,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Garut | 4,850,000,000 | - | 4,850,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Karawang | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| XIII | JAWA TENGAH | 18,000,000,000 | - | 18,000,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Banyumas | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Banjarnegara | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Rembang | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Jepara | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Pemalang | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Tegal | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 |
| 7 | Dinkes Kab. Brebes | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 |
| XIV | DI YOGYAKARTA | 14,028,700,000 | - | 14,028,700,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Kulon Progo | 4,290,000,000 | - | 4,290,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Gunung Kidul | 2,280,000,000 | - | 2,280,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Sleman | 3,958,700,000 | - | 3,958,700,000 |
| 4 | Dinkes Kota Yogyakarta | 3,500,000,000 | - | 3,500,000,000 |
| XV | JAWA TIMUR | 21,427,909,000 | - | 21,427,909,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Situbondo | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Tuban | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Gresik | 3,500,000,000 | - | 3,500,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Bangkalan | 4,000,000,000 | - | 4,000,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Sampang | 4,700,000,000 | - | 4,700,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Pamekasan | 2,227,909,000 | - | 2,227,909,000 |
| XVI | BANTEN | 6,477,500,000 | - | 6,477,500,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Tangerang | 3,477,500,000 | - | 3,477,500,000 |
| 2 | Dinkes Kota Cilegon | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

A. BERSUMBER APBN

| XVII | BALI | 10,131,100,000 | 63,613,000,000 | 73,744,100,000 |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dinkes Kab. Jembrana | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Gianyar | 816,400,000 | - | 816,400,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Klungkung | 3,000,000,000 | 30,263,000,000 | 33,263,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Buleleng | 3,314,700,000 | 33,350,000,000 | 36,664,700,000 |
| XVIII | NUSA TENGGARA BARAT | 27,800,000,000 | - | 27,800,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Lombok Barat | 4,100,000,000 | - | 4,100,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Lombok Tengah | 4,200,000,000 | - | 4,200,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Lombok Timur | 4,400,000,000 | - | 4,400,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Bima | 3,350,000,000 | - | 3,350,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Sumbawa Barat | 3,650,000,000 | - | 3,650,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Lombok Utara | 3,600,000,000 | - | 3,600,000,000 |
| 7 | Dinkes Kota Bima | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| XIX | NUSA TENGGARA TIMUR | 45,817,500,000 | - | 45,817,500,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Sumba Barat | 3,600,000,000 | - | 3,600,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Sumba Timur | 4,100,000,000 | - | 4,100,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Kupang | 3,950,000,000 | - | 3,950,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Timor Tengah Utara | 4,000,000,000 | - | 4,000,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Belu | 4,667,500,000 | - | 4,667,500,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Lembata | 4,100,000,000 | - | 4,100,000,000 |
| 7 | Dinkes Kab. Sikka | 4,100,000,000 | - | 4,100,000,000 |
| 8 | Dinkes Kab. Rote Ndao | 4,000,000,000 | - | 4,000,000,000 |
| 9 | Dinkes Kab. Manggarai Barat | 3,600,000,000 | - | 3,600,000,000 |
| 10 | Dinkes Kab. Sumba Tengah | 3,600,000,000 | - | 3,600,000,000 |
| 11 | Dinkes Kab. Sumba Barat Daya | 3,100,000,000 | - | 3,100,000,000 |
| 12 | Dinkes Kab. Manggarai Timur | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| XX | KALIMANTAN BARAT | 32,800,000,000 | - | 32,800,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Sambas | 4,800,000,000 | - | 4,800,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Bengkayang | 4,450,000,000 | - | 4,450,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Pontianak | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Sanggau | 4,850,000,000 | - | 4,850,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Ketapang | 3,600,000,000 | - | 3,600,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Sintang | 4,700,000,000 | - | 4,700,000,000 |
| 7 | Dinkes Kab. Sekadau | 3,400,000,000 | - | 3,400,000,000 |
| 8 | Dinkes Kab. Melawi | 4,000,000,000 | - | 4,000,000,000 |
| XXI | KALIMANTAN TENGAH | 4,300,000,000 | 22,648,630,000 | 26,948,630,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Katingan | 4,300,000,000 | - | 4,300,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Kotawaringin Timur | - | 22,648,630,000 | 22,648,630,000 |
| XXII | KALIMANTAN SELATAN | 9,015,000,000 | 23,299,956,000 | 32,314,956,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Tanah Laut | 1,915,000,000 | - | 1,915,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Barito Kuala | 4,100,000,000 | - | 4,100,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Hulu Sungai Utara | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| | Dinkes Kab. Hulu Sungai Selatan | - | 23,299,956,000 | 23,299,956,000 |
| XXIII | KALIMANTAN TIMUR | 6,807,000,000 | 19,000,000,000 | 25,807,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Pasir | 1,483,500,000 | - | 1,483,500,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Kutai Timur | 2,701,000,000 | - | 2,701,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Mahakam Hulu *) | 2,622,500,000 | - | 2,622,500,000 |
| 4 | RSUD Abdul Wahab Sjahrani | - | 19,000,000,000 | 19,000,000,000 |
| XXIV | KALIMANTAN UTARA | 12,110,536,000 | - | 12,110,536,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Malinau | 3,310,536,000 | - | 3,310,536,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Bulungan | 4,300,000,000 | - | 4,300,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Nunukan | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

A. BERSUMBER APBN

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| XXV | SULAWESI UTARA | 9,085,000,000 | - | 9,085,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Minahasa Utara | 4,300,000,000 | - | 4,300,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Siau Tagulandang Biaro | 1,800,000,000 | - | 1,800,000,000 |
| 3 | Dinkes Kota Manado | 2,985,000,000 | - | 2,985,000,000 |
| XXVI | SULAWESI TENGAH | 23,820,000,000 | 71,640,622,000 | 95,460,622,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Morowali | 4,191,000,000 | 17,757,272,000 | 21,948,272,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Buol | 3,410,000,000 | - | 3,410,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Parigi Moutong | 3,786,000,000 | 19,716,423,000 | 23,502,423,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Tojo Una-una | 2,996,000,000 | - | 2,996,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Sigi | 3,120,000,000 | - | 3,120,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Banggai Laut *) | 3,256,000,000 | - | 3,256,000,000 |
| 7 | Dinkes Kab. Morowali Utara *) | 3,061,000,000 | - | 3,061,000,000 |
| 8 | Dinkes Kab. Banggai | - | 17,684,172,000 | 17,684,172,000 |
| 9 | Dinkes Kab. Banggai Kepulauan | - | 16,482,755,000 | 16,482,755,000 |
| XXVII | SULAWESI SELATAN | 18,900,000,000 | 23,132,787,000 | 42,032,787,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Kepulauan Selayar | 4,300,000,000 | - | 4,300,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Bulukumba | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Janeponto | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Pangkajene Kepulauan | 4,600,000,000 | - | 4,600,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Luwu | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Toraja Utara | 2,500,000,000 | 23,132,787,000 | 25,632,787,000 |
| XXVIII | SULAWESI TENGGARA | 38,232,500,000 | - | 38,232,500,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Buton | 3,900,000,000 | - | 3,900,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Konawe | 4,632,500,000 | - | 4,632,500,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Wakatobi | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Kolaka Utara | 5,400,000,000 | - | 5,400,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Buton Utara | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Konawe Utara | 3,550,000,000 | - | 3,550,000,000 |
| 7 | Dinkes Kota Kendari | 4,000,000,000 | - | 4,000,000,000 |
| 8 | Dinkes Kota Bau-bau | 4,550,000,000 | - | 4,550,000,000 |
| 9 | Dinkes Kab. Kolaka Timur *) | 4,700,000,000 | - | 4,700,000,000 |
| XXIX | GORONTALO | 8,804,854,000 | - | 8,804,854,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Boalemo | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Pohuwato | 2,404,854,000 | - | 2,404,854,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Gorontalo Utara | 4,400,000,000 | - | 4,400,000,000 |
| XXX | SULAWESI BARAT | 17,793,323,000 | - | 17,793,323,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Majene | 3,743,323,000 | - | 3,743,323,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Polewali Mandar | 4,650,000,000 | - | 4,650,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Mamuju | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Mamuju Utara | 4,900,000,000 | - | 4,900,000,000 |
| XXXI | MALUKU | 25,625,000,000 | - | 25,625,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Maluku Tenggara Barat | 4,000,000,000 | - | 4,000,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Maluku Tenggara | 4,625,000,000 | - | 4,625,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Maluku Tengah | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Buru | 3,350,000,000 | - | 3,350,000,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Seram Bagian Barat | 4,850,000,000 | - | 4,850,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Buru Selatan | 4,300,000,000 | - | 4,300,000,000 |
| XXXII | MALUKU UTARA | 26,100,000,000 | - | 26,100,000,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Halmahera Barat | 3,950,000,000 | - | 3,950,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Halmahera Tengah | 4,750,000,000 | - | 4,750,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Halmahera Selatan | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Halmahera Timur | 4,550,000,000 | - | 4,550,000,000 |
| 5 | Dinkes Kota Ternate | 4,300,000,000 | - | 4,300,000,000 |
| 6 | Dinkes Kota Tidore Kepulauan | 4,050,000,000 | - | 4,050,000,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

A. BERSUMBER APBN

| | | | | |
|---------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| XXXIII | PAPUA BARAT | 38,401,677,000 | - | 38,401,677,000 |
| 1 | Dinkes Kab. Kaimana | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Teluk Wondama | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Teluk Bintuni | 4,880,000,000 | - | 4,880,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Manokwari | 4,521,677,000 | - | 4,521,677,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Sorong Selatan | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Sorong | 3,500,000,000 | - | 3,500,000,000 |
| 7 | Dinkes Kab. Raja Ampat | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 8 | Dinkes Kab. Tambrauw | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 |
| 9 | Dinkes Kota Sorong | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| XXXIV | PAPUA | 32,439,000,000 | 137,290,305,000 | 169,729,305,000 |
| 1 | RSUD Dok II Jayapura | - | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 |
| 2 | Dinkes Kab. Jayapura | 4,779,500,000 | - | 4,779,500,000 |
| 3 | Dinkes Kab. Boven Digoel | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 |
| 4 | Dinkes Kab. Sarmi | 4,420,500,000 | - | 4,420,500,000 |
| 5 | Dinkes Kab. Supiori | 4,000,000,000 | - | 4,000,000,000 |
| 6 | Dinkes Kab. Nduga | 4,900,000,000 | 59,222,804,000 | 64,122,804,000 |
| 7 | Dinkes Kab. Dogiyai | 4,939,000,000 | - | 4,939,000,000 |
| 8 | Dinkes Kab. Intan Jaya | 4,900,000,000 | 57,067,501,000 | 61,967,501,000 |
| | Total | 654,613,177,000 | 382,156,498,000 | 1,036,769,675,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
B. BERSUMBER APBN-P**

1. Penguatan RS Rujukan Provinsi dan Regional

| NO | PROVINSI KABUPATEN / KOTA | SATKER PENGELOLA | | ALOKASI |
|-------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| I | PROVINSI ACEH | | | 91,354,000,000 |
| 1 | Kab. Aceh Tengah | 1 | RSUD Datu Beru Takengon | 4,038,000,000 |
| 2 | Kab. Bireuen | 2 | RSUD Dr.Fauziah Bireuen | 11,316,000,000 |
| 3 | Kota Langsa | 3 | RSUD Kota Langsa | 18,000,000,000 |
| 4 | Kab. Aceh selatan | 4 | RSUD DR H. Yulidin Away | 18,000,000,000 |
| 5 | Kab. Aceh Barat | 5 | RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh | 18,000,000,000 |
| 6 | Kota Banda Aceh | 6 | RSUD dr. Zainoel Abidin | 22,000,000,000 |
| | | | | |
| II | PROVINSI SUMATERA UTARA | | | 76,601,000,000 |
| 1 | Kota Medan | 7 | RSU Haji Provinsi | 18,000,000,000 |
| 2 | Kota Pematang Siantar | 8 | RSUD dr. Djasamen Saragih | 11,976,000,000 |
| 3 | Kab. Labuhan Batu | 9 | RSUD Rantauprapat | 13,125,000,000 |
| 4 | Kota Padang sidempuan | 10 | RSUD Padang Sidempuan | 5,500,000,000 |
| 5 | Kab. Nias | 11 | RSU Gunung Sitoli | 18,000,000,000 |
| 6 | Kota Medan | 12 | RSUD Pirngadi | 10,000,000,000 |
| | | | | |
| III | PROVINSI SUMATERA BARAT | | | 51,493,000,000 |
| 1 | Kota Solok | 13 | RSUD Kota Solok | 18,000,000,000 |
| 2 | Kota Pariaman | 14 | RSUD Provinsi Pariaman | 18,000,000,000 |
| 3 | Kota Bukittinggi | 15 | RSUD Achmad Mochtar | 15,493,000,000 |
| | | | | |
| IV | PROVINSI RIAU | | | 54,853,000,000 |
| 1 | Kota Dumai | 16 | RSUD Dumai | 7,784,000,000 |
| 2 | Kab. Bengkalis | 17 | RSUD Bengkalis | 3,907,000,000 |
| 3 | Kab. Kampar | 18 | RSUD Bangkinang | 6,393,000,000 |
| 4 | Kab. Pelalawan | 19 | RSUD Selasih | 14,769,000,000 |
| 5 | Kota Pekanbaru | 20 | RSUD Arifin Achmad | 22,000,000,000 |
| | | | | |
| V | PROVINSI JAMBI | | | 58,000,000,000 |
| 1 | Kab. Bungo | 21 | RSUD H. Hanafie | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Muaro Jambi | 22 | RSUD Muaro Jambi | 18,000,000,000 |
| 3 | Kota Jambi | 23 | RSUD Raden Mattaher | 22,000,000,000 |
| | | | | |
| VI | PROVINSI SUMATERA SELATAN | | | 47,006,000,000 |
| 1 | Kota Palembang | 24 | RSUD Palembang Bari | 18,000,000,000 |
| 2 | Kota Lubuk Linggau | 25 | RSUD Siti Aisyah | 18,000,000,000 |
| 3 | Kab. Muara Enim | 26 | RSUD Rabain Muara Enim | 3,493,000,000 |
| 4 | Kab. Ogan Komering Ulu | 27 | RSUD Ibnu Sutowo Baturaja | 7,513,000,000 |
| | | | | |
| VII | PROVINSI BENGKULU | | | 71,872,000,000 |
| 1 | Kab. Muko-Muko | 28 | RSUD Muko-Muko | 19,000,000,000 |
| 2 | Kab. Rejang Lebong | 29 | RSU Curup | 15,872,000,000 |
| 3 | Kab. Bengkulu Selatan | 30 | RSUD Hasanuddin Damrah Manna | 15,000,000,000 |
| 4 | Kota Bengkulu | 31 | RSUD M.Yunus | 22,000,000,000 |
| | | | | |
| VIII | PROVINSI LAMPUNG | | | 50,000,000,000 |
| 1 | Kota Metro | 32 | RSUD.A.Yani | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Tulang Bawang | 33 | RSUD Menggala | 10,000,000,000 |
| 3 | Kota Bandar Lampung | 34 | RSUD dr. A. Moeloek | 22,000,000,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

| NO | PROVINSI KABUPATEN / KOTA | SATKER PENGELOLA | | ALOKASI |
|--------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------------|
| IX | PROVINSI BANGKA BELITUNG | | | 40,000,000,000 |
| 1 | Kab. Belitung | 35 | RSUD dr. H. Marsidi Judono | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Bangka | 36 | RSUD dr. HC Soekarno | 22,000,000,000 |
| X | PROVINSI KEPULAUAN RIAU | | | 30,171,000,000 |
| 1 | Kota Batam | 37 | RSUD Embung Fatimah | 18,000,000,000 |
| 2 | Kota Tanjung Pinang | 38 | RSUD Provinsi Kepulauan Riau | 12,171,000,000 |
| XI | PROVINSI JAWA BARAT | | | 103,312,000,000 |
| 1 | Kab. Bandung | 39 | RSUD Al Ihsan | 18,000,000,000 |
| 2 | Kota Cimahi | 40 | RSUD Cibabat | 9,745,000,000 |
| 3 | Kota Tasikmalaya | 41 | RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya | 18,000,000,000 |
| 4 | Kota Cirebon | 42 | RSUD Gunung Jati | 18,000,000,000 |
| 5 | Kab. Karawang | 43 | RSUD Karawang | 10,700,000,000 |
| 6 | Kab. Bogor | 44 | RSUD Cibinong | 10,867,000,000 |
| 7 | Kota Sukabumi | 45 | RSUD Syamsudin | 18,000,000,000 |
| XII | PROVINSI JAWA TENGAH | | | 118,496,000,000 |
| 1 | Kota Surakarta | 46 | RSUD Dr. Moewardi | 18,000,000,000 |
| 2 | Kota Banyumas | 47 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | 18,000,000,000 |
| 3 | Kota Semarang | 48 | RSU Tugurejo | 18,000,000,000 |
| 4 | Kota Tegal | 49 | RSUD Kardinah | 18,000,000,000 |
| 5 | Kota Magelang | 50 | RSUD Tidar | 10,496,000,000 |
| 6 | Kab. Pekalongan | 51 | RSUD Kraton | 18,000,000,000 |
| 7 | Kab. Pati | 52 | RSUD RAA. Soewondo | 18,000,000,000 |
| XIII | PROVINSI DI YOGYAKARTA | | | 3,846,000,000 |
| 1 | Kota Yogyakarta | 53 | RSUD Yogya - Wirosaban | 3,846,000,000 |
| XIV | PROVINSI JAWA TIMUR | | | 103,097,000,000 |
| 1 | Kota Malang | 54 | RSUD dr. Saiful Anwar | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Gresik | 55 | RSUD Ibnu Sina Gresik | 18,000,000,000 |
| 3 | Kota Surabaya | 56 | RSUD Haji Surabaya | 18,000,000,000 |
| 4 | Kota Madiun | 57 | RSUD Soedono Madiun | 13,097,000,000 |
| 5 | Kab. Jombang | 58 | RSUD Jombang | 18,000,000,000 |
| 6 | Kab. Jember | 59 | RSUD Soebandi Jember | 18,000,000,000 |
| XV | PROVINSI BANTEN | | | 40,000,000,000 |
| 1 | Kab. Serang | 60 | RSUD Serang | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Tangerang | 61 | RSUD Kab. Tangerang | 22,000,000,000 |
| XVI | BALI | | | 19,740,000,000 |
| 1 | Kab. Tabanan | 62 | RSUD Tabanan | 8,598,000,000 |
| 2 | Kota Gianyar | 63 | RSUD Sanjiwani | 11,142,000,000 |
| XVII | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | | | 40,000,000,000 |
| 1 | Kota Sumbawa | 64 | RSUD Propinsi di Sumbawa | 18,000,000,000 |
| 2 | Kota Mataram | 65 | RSUD Propinsi NTB | 22,000,000,000 |
| XVIII | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | | | 88,981,000,000 |
| 1 | Kab. Belu | 66 | RSUD MGR Gabriel Manek | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Sikka | 67 | RSUD dr TC Hillers Maumere | 18,000,000,000 |
| 3 | Kab. Manggarai | 68 | RSUD Ruteng | 18,000,000,000 |
| 4 | Kab. Sumba Timur | 69 | RSUD Umbu Rara Waingapu. | 12,981,000,000 |
| 5 | Kab. Kupang | 70 | RSUD Prof. dr. WZ Johannes | 22,000,000,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

| NO | PROVINSI KABUPATEN / KOTA | | SATKER PENGELOLA | ALOKASI |
|--------------|------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------|
| XIX | PROVINSI KALIMANTAN BARAT | | | 61,146,000,000 |
| 1 | Kota Singkawang | 71 | RSUD Dr Abdul Azis | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Sintang | 72 | RSUD Ade Muhammad Djoen | 18,000,000,000 |
| 3 | Kab. Sanggau | 73 | RSUD Kab. Sanggau | 11,710,000,000 |
| 4 | Kab. Ketapang | 74 | RSUD Dr. Agoesdjam | 13,436,000,000 |
| XX | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | | | 62,047,000,000 |
| 1 | Kotawaringin Timur | 75 | RSUD Murjani Sampit | 18,000,000,000 |
| 2 | Kotawaringin Barat | 76 | RSUD Imanuddin Pangkalan Bun | 18,000,000,000 |
| 3 | Kab. Barito Utara | 77 | RSUD Muara Teweh | 4,047,000,000 |
| 4 | Kota Palangka Raya | 78 | RSUD dr. Doris Sylvanus | 22,000,000,000 |
| XXI | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | | | 67,601,000,000 |
| 1 | Kota Banjarmasin | 79 | RSUD M.Ansari Saleh | 10,020,000,000 |
| 2 | Kab. Banjar | 80 | RSUD Ratu Zalecha | 11,475,000,000 |
| 3 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 81 | RSUD H Hasan Basry | 14,106,000,000 |
| 4 | Kab. Kotabaru | 82 | RSUD Kotabaru | 10,000,000,000 |
| 5 | Kota Banjarmasin | 83 | RSUD Ulin Banjarmasin | 22,000,000,000 |
| XXII | PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | | | 28,058,000,000 |
| 1 | Kab. Kutai Kartanegara | 84 | RSUD AM Parikesit Tenggarong | 10,920,000,000 |
| 2 | Kota Samarinda | 85 | RSUD Inche Abdoel Moeis | 17,138,000,000 |
| XXIII | PROVINSI SULAWESI UTARA | | | 58,185,000,000 |
| 1 | Kota Minahasa | 86 | RSUD Noongan | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Kepulauan Sangihe | 87 | RSUD Liun Kendage | 18,000,000,000 |
| 3 | Kab. Minahasa Utara | 88 | RSUD Maria Walanda Maramis | 3,000,000,000 |
| 4 | Kota Kotamobagu | 89 | RSUD Popundayan | 19,185,000,000 |
| XXIV | PROVINSI SULAWESI TENGAH | | | 89,535,000,000 |
| 1 | Kab. Toli-Toli | 90 | RSUD Mokopido Toli-Toli | 13,535,000,000 |
| 2 | Kab. Parigi Moutong | 91 | RSUD Anuntaloko-Parigi Moutong | 18,000,000,000 |
| 3 | Kab. Banggai | 92 | RS Luwuk | 18,000,000,000 |
| 4 | Kab. Morowali | 93 | RSUD Morowali | 18,000,000,000 |
| 5 | Kota Palu | 94 | RSUD Undata | 22,000,000,000 |
| XXV | PROVINSI SULAWESI SELATAN | | | 108,000,000,000 |
| 1 | Kota Polopo | 95 | RSUD Sawerigading | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Bone | 96 | RSUD Tenriawaru Bone | 18,000,000,000 |
| 3 | Kab. Parepare | 97 | RSUD Andi Makassar | 18,000,000,000 |
| 4 | Kab. Bulukumba | 98 | RSUD HA Sulthan Daeng Raja | 18,000,000,000 |
| 5 | Kota Makassar | 99 | RSUD Daya Makassar | 18,000,000,000 |
| 6 | Kota Makassar | 100 | RSUD Labuang Baji | 18,000,000,000 |
| XXVI | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | | | 44,192,000,000 |
| 1 | Kota Bau-Bau | 101 | RSUD Kota Bau-Bau | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Kolaka | 102 | RSUD Bunyamin Guluh | 4,192,000,000 |
| 3 | Kota Kendari | 103 | RSUD Bahtera Mas | 22,000,000,000 |
| XXVII | PROVINSI GORONTALO | | | 46,881,000,000 |
| 1 | Kab. Gorontalo | 104 | RSUD dr. M Mohammad Dunda | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Boalemo | 105 | RSUD Tani dan Nelayan | 6,881,000,000 |
| 3 | Kota Gorontalo | 106 | RSUD Prof. Aloei Saboe | 22,000,000,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

| NO | PROVINSI KABUPATEN / KOTA | SATKER PENGELOLA | | ALOKASI |
|---------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| XXVIII | PROVINSI SULAWESI BARAT | | | 40,000,000,000 |
| 1 | Kab. Polewali Mandar | 107 | RSUD Kab. Polewali Mandar | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Mamuju | 108 | RSUD Propinsi Sulbar | 22,000,000,000 |
| | | | | |
| XXIX | PROVINSI MALUKU | | | 49,131,000,000 |
| 1 | Kab. Buru | 109 | RSU Namlea | 3,310,000,000 |
| 2 | Kab. Maluku Tenggara | 110 | RSU Karel Sadsuitubun | 5,821,000,000 |
| 3 | Kab. Maluku Tengah | 111 | RSU Masohi | 18,000,000,000 |
| 4 | Kota Ambon | 112 | RSUD Dr. M. Haulusy | 22,000,000,000 |
| | | | | |
| XXX | PROVINSI MALUKU UTARA | | | 59,637,000,000 |
| 1 | Kota Tidore Kepulauan | 113 | RSU Kota Tidore Kepulauan | 15,077,000,000 |
| 2 | Kab. Halmahera Selatan | 114 | RSUD Labuha | 13,000,000,000 |
| 3 | Kab. Halmahera Utara | 115 | RSUD Tubelo | 9,560,000,000 |
| 4 | Kab. Ternate | 116 | RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie | 22,000,000,000 |
| | | | | |
| XXXI | PROVINSI PAPUA | | | 77,000,000,000 |
| 1 | Kota Jayapura | 117 | RSUD Abepura | 18,000,000,000 |
| 2 | Kab. Jayawijaya | 118 | RSUD Wamena | 19,000,000,000 |
| 3 | Kab. Nabire | 119 | RSUD Nabire | 10,000,000,000 |
| 4 | Kab. Merauke | 120 | RSUD Merauke | 10,000,000,000 |
| 5 | Kab. Biak Numfor | 121 | RSUD Biak | 10,000,000,000 |
| 6 | Kab. Mimika | 122 | RSUD Mimika | 10,000,000,000 |
| | | | | |
| XXXII | PROVINSI PAPUA BARAT | | | 33,855,000,000 |
| 1 | Kab. Manokwari | 123 | RSUD Kabupaten Manokwari | 11,855,000,000 |
| 2 | Kab. Sorong | 124 | RSUD Kabupaten Sorong | 22,000,000,000 |
| | | | | |
| XXXIII | PROVINSI DKI JAKARTA | | | 50,000,000,000 |
| 1 | Kota Jakarta Pusat | 125 | RSUD Tarakan | 10,000,000,000 |
| 2 | Kota Jakarta Utara | 126 | RSUD Koja | 10,000,000,000 |
| 3 | Kota Jakarta Barat | 127 | RSUD Cengkareng | 10,000,000,000 |
| 4 | Kota Jakarta Selatan | 128 | RSUD Pasar Rebo | 10,000,000,000 |
| 5 | Kota Jakarta Timur | 129 | RSUD Budi Asih | 10,000,000,000 |
| | | | | |
| XXXIV | PROVINSI KALIMANTAN UTARA | | | 22,000,000,000 |
| 1 | Kota Tarakan | 130 | RSUD Tarakan | 22,000,000,000 |
| | | | | |
| | | | JUMLAH | 1,986,090,000,000 |

2. Penguatan RS Rujukan Nasional

| NO | PROVINSI KABUPATEN / KOTA | SATKER PENGELOLA | | ALOKASI |
|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| I | PROVINSI JAWA TIMUR | | | 20,000,000,000 |
| 1 | Kota Surabaya | 1 | RSUD Dr Soetomo | 20,000,000,000 |
| | | | | |
| II | PROVINSI KALIMANTAN BARAT | | | 23,200,000,000 |
| 1 | Kota Pontianak | 1 | RSUD M. Soedarso | 23,200,000,000 |
| | | | | |
| | | | JUMLAH | 43,200,000,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|-----------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| I | PROVINSI ACEH | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue | 1,315,645,000 | 187,000,000 | - | 1,502,645,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil | 1,409,058,000 | 205,000,000 | - | 1,614,058,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan | 2,977,343,000 | 421,000,000 | - | 3,398,343,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara | 2,054,495,000 | 331,000,000 | - | 2,385,495,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur | 4,064,363,000 | 475,000,000 | - | 4,539,363,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah | 1,537,937,000 | 259,000,000 | - | 1,796,937,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat | 1,727,200,000 | 241,000,000 | - | 1,968,200,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar | 4,702,289,000 | 511,000,000 | - | 5,213,289,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie | 3,433,384,000 | 475,000,000 | - | 3,908,384,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen | 2,393,877,000 | 331,000,000 | - | 2,724,877,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara | 4,588,982,000 | 565,000,000 | - | 5,153,982,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya | 1,703,007,000 | 241,000,000 | - | 1,944,007,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues | 1,508,055,000 | 223,000,000 | - | 1,731,055,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang | 1,676,629,000 | 259,000,000 | - | 1,935,629,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya | 1,807,953,000 | 259,000,000 | - | 2,066,953,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya | 1,332,563,000 | 187,000,000 | - | 1,519,563,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah | 1,434,492,000 | 205,000,000 | - | 1,639,492,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya | 1,544,602,000 | 205,000,000 | - | 1,749,602,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh | 918,267,000 | 205,000,000 | - | 1,123,267,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Kota Sabang | 489,030,000 | 115,000,000 | - | 604,030,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Kota Langsa | 414,903,000 | 100,000,000 | - | 514,903,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe | 510,911,000 | 115,000,000 | - | 625,911,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan Kota Subulussalam | 399,207,000 | 100,000,000 | - | 499,207,000 |
| | JUMLAH: | 43,944,192,000 | 6,215,000,000 | - | 50,159,192,000 |
| II | SUMATERA UTARA | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Nias | 1,228,233,000 | 186,000,000 | - | 1,414,233,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal | 2,942,678,000 | 474,000,000 | - | 3,416,678,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan | 1,813,585,000 | 294,000,000 | - | 2,107,585,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah | 3,086,946,000 | 420,000,000 | - | 3,506,946,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara | 2,116,130,000 | 348,000,000 | - | 2,464,130,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir | 2,131,131,000 | 348,000,000 | - | 2,479,131,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu | 1,507,751,000 | 240,000,000 | - | 1,747,751,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan | 2,791,029,000 | 402,000,000 | - | 3,193,029,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun | 4,583,125,000 | 618,000,000 | - | 5,201,125,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi | 2,028,102,000 | 330,000,000 | - | 2,358,102,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Karo | 2,150,418,000 | 348,000,000 | - | 2,498,418,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang | 4,861,149,000 | 618,000,000 | - | 5,479,149,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat | 3,951,447,000 | 546,000,000 | - | 4,497,447,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan | 4,548,529,000 | 654,000,000 | - | 5,202,529,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan | 1,292,290,000 | 222,000,000 | - | 1,514,290,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat | 957,773,000 | 150,000,000 | - | 1,107,773,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir | 1,266,800,000 | 222,000,000 | - | 1,488,800,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai | 2,432,405,000 | 366,000,000 | - | 2,798,405,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara | 1,477,204,000 | 240,000,000 | - | 1,717,204,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara | 1,877,082,000 | 312,000,000 | - | 2,189,082,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas | 1,473,196,000 | 258,000,000 | - | 1,731,196,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Selatan | 1,841,290,000 | 312,000,000 | - | 2,153,290,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara | 2,052,205,000 | 312,000,000 | - | 2,364,205,000 |
| 24 | Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara | 1,402,235,000 | 204,000,000 | - | 1,606,235,000 |
| 25 | Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat | 953,713,000 | 150,000,000 | - | 1,103,713,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 6 |
| 26 | Dinas Kesehatan | Kota Sibolga | 325,381,000 | 90,000,000 | - | 415,381,000 |
| 27 | Dinas Kesehatan | Kota Tanjung Balai | 663,093,000 | 150,000,000 | - | 813,093,000 |
| 28 | Dinas Kesehatan | Kota Pematang Siantar | 1,579,669,000 | 348,000,000 | - | 1,927,669,000 |
| 29 | Dinas Kesehatan | Kota Tebing Tinggi | 739,636,000 | 168,000,000 | - | 907,636,000 |
| 30 | Dinas Kesehatan | Kota Medan | 3,712,047,000 | 708,000,000 | - | 4,420,047,000 |
| 31 | Dinas Kesehatan | Kota Binjai | 670,838,000 | 150,000,000 | - | 820,838,000 |
| 32 | Dinas Kesehatan | Kota Padangsidempuan | 725,424,000 | 168,000,000 | - | 893,424,000 |
| 33 | Dinas Kesehatan | Kota Gunungsitoli | 485,985,000 | 114,000,000 | - | 599,985,000 |
| JUMLAH: | | | 65,668,519,000 | 10,470,000,000 | - | 76,138,519,000 |
| III SUMATERA BARAT | | | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1,314,517,000 | 185,000,000 | | 1,499,517,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2,448,861,000 | 329,000,000 | | 2,777,861,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Solok | 2,413,333,000 | 329,000,000 | | 2,742,333,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Sijunjung | 1,567,608,000 | 221,000,000 | | 1,788,608,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Tanah Datar | 2,600,544,000 | 419,000,000 | | 3,019,544,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Padang Pariaman | 3,488,608,000 | 455,000,000 | | 3,943,608,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Agam | 2,541,239,000 | 401,000,000 | | 2,942,239,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Lima Puluh Kota | 2,425,029,000 | 401,000,000 | | 2,826,029,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Pasaman | 1,686,961,000 | 293,000,000 | | 1,979,961,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Solok Selatan | 1,053,869,000 | 149,000,000 | | 1,202,869,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Dharmas Raya | 1,713,271,000 | 239,000,000 | | 1,952,271,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Pasaman Barat | 2,219,340,000 | 311,000,000 | | 2,530,340,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan | Kota Padang | 1,998,030,000 | 401,000,000 | | 2,399,030,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan | Kota Solok | 240,000,000 | 90,000,000 | | 330,000,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan | Kota Sawah Lunto | 360,000,000 | 113,000,000 | | 473,000,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan | Kota Padang Panjang | 240,000,000 | 90,000,000 | | 330,000,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan | Kota Bukittinggi | 564,943,000 | 131,000,000 | | 695,943,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan | Kota Payakumbuh | 645,273,000 | 149,000,000 | | 794,273,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan | Kota Pariaman | 566,258,000 | 131,000,000 | | 697,258,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan | Kota Pariaman | | | | - |
| JUMLAH: | | | 30,087,684,000 | 4,837,000,000 | - | 34,924,684,000 |
| IV RIAU | | | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Kuantan Singingi | 2,672,748,000 | 419,000,000 | | 3,091,748,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Indragiri Hulu | 2,027,764,000 | 329,000,000 | | 2,356,764,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Indragiri Hilir | 3,017,949,000 | 455,000,000 | | 3,472,949,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Pelalawan | 1,362,219,000 | 221,000,000 | | 1,583,219,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Siak | 900,000,000 | 275,000,000 | | 1,175,000,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Kampar | 4,021,391,000 | 563,000,000 | | 4,584,391,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Rokan Hulu | 2,439,940,000 | 383,000,000 | | 2,822,940,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 660,000,000 | 203,000,000 | | 863,000,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Rokan Hilir | 2,023,444,000 | 311,000,000 | | 2,334,444,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Kepulauan Meranti | 958,559,000 | 167,000,000 | | 1,125,559,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan | Kota Pekanbaru | 1,802,668,000 | 365,000,000 | | 2,167,668,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan | Kota Dumai | 540,000,000 | 167,000,000 | | 707,000,000 |
| JUMLAH: | | | 22,426,682,000 | 3,858,000,000 | - | 26,284,682,000 |
| V JAMBI | | | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Kerinci | 1,775,779,000 | 329,000,000 | | 2,104,779,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Merangin | 2,029,456,000 | 347,000,000 | | 2,376,456,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Sarolangun | 1,986,483,000 | 239,000,000 | | 2,225,483,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Batang Hari | 2,130,417,000 | 311,000,000 | | 2,441,417,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Muaro Jambi | 2,101,190,000 | 329,000,000 | | 2,430,190,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 1,417,820,000 | 311,000,000 | | 1,728,820,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 1,685,157,000 | 293,000,000 | | 1,978,157,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo | 1,852,795,000 | 257,000,000 | | 2,109,795,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo | 1,551,096,000 | 329,000,000 | | 1,880,096,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kota Jambi | 1,708,301,000 | 365,000,000 | | 2,073,301,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh | 360,000,000 | 113,000,000 | | 473,000,000 |
| JUMLAH: | | 18,598,494,000 | 3,223,000,000 | - | 21,821,494,000 |
| VI SUMATERA SELATAN | | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu | 1,861,408,000 | 292,000,000 | - | 2,153,408,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir | 4,770,466,000 | 526,000,000 | - | 5,296,466,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim | 2,286,855,000 | 346,000,000 | - | 2,632,855,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat | 4,412,411,000 | 562,000,000 | - | 4,974,411,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas | 2,799,208,000 | 346,000,000 | - | 3,145,208,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin | 3,046,293,000 | 472,000,000 | - | 3,518,293,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Banyu Asin | 4,428,660,000 | 526,000,000 | - | 4,954,660,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten mering Ulu Selatan | 2,494,904,000 | 346,000,000 | - | 2,840,904,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Komering Ulu Timur | 2,798,887,000 | 400,000,000 | - | 3,198,887,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir | 3,758,596,000 | 454,000,000 | - | 4,212,596,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang | 995,444,000 | 148,000,000 | - | 1,143,444,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Abab Lematang Ilir | 722,164,000 | 112,000,000 | - | 834,164,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara | 1,178,614,000 | 148,000,000 | - | 1,326,614,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kota Palembang | 3,492,109,000 | 706,000,000 | - | 4,198,109,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Kota Prabumulih | 666,477,000 | 148,000,000 | - | 814,477,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam | 573,956,000 | 130,000,000 | - | 703,956,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau | 739,297,000 | 166,000,000 | - | 905,297,000 |
| JUMLAH: | | 41,025,749,000 | 5,828,000,000 | - | 46,853,749,000 |
| VII BENGKULU | | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan | 1,477,407,000 | 257,000,000 | | 1,734,407,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong | 2,295,063,000 | 383,000,000 | | 2,678,063,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara | 2,511,050,000 | 401,000,000 | | 2,912,050,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur | 2,009,387,000 | 293,000,000 | | 2,302,387,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma | 2,865,263,000 | 401,000,000 | | 3,266,263,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko | 2,260,564,000 | 311,000,000 | | 2,571,564,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong | 1,729,396,000 | 257,000,000 | | 1,986,396,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang | 1,742,028,000 | 257,000,000 | | 1,999,028,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah | 2,569,256,000 | 365,000,000 | | 2,934,256,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kota Bengkulu | 1,688,375,000 | 365,000,000 | | 2,053,375,000 |
| JUMLAH: | | 21,147,789,000 | 3,290,000,000 | - | 24,437,789,000 |
| VIII LAMPUNG | | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat | 1,660,997,000 | 220,000,000 | | 1,880,997,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus | 2,671,450,000 | 418,000,000 | | 3,089,450,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan | 3,360,560,000 | 472,000,000 | | 3,832,560,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur | 4,360,239,000 | 598,000,000 | | 4,958,239,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah | 4,972,912,000 | 670,000,000 | | 5,642,912,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara | 3,910,406,000 | 472,000,000 | | 4,382,406,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan | 2,690,451,000 | 346,000,000 | | 3,036,451,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang | 1,935,052,000 | 328,000,000 | | 2,263,052,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran | 1,634,604,000 | 220,000,000 | | 1,854,604,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu | 1,188,528,000 | 202,000,000 | | 1,390,528,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji | 1,232,286,000 | 220,000,000 | | 1,452,286,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang Barat | 969,387,000 | 166,000,000 | | 1,135,387,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat | 1,245,747,000 | 166,000,000 | | 1,411,747,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung | 2,688,494,000 | 544,000,000 | | 3,232,494,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Kota Metro | 921,989,000 | 202,000,000 | | 1,123,989,000 |
| | JUMLAH: | 35,443,102,000 | 5,244,000,000 | - | 40,687,102,000 |
| | | | | | |
| IX | KEPULAUAN RIAU | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun | 995,948,000 | 167,000,000 | | 1,162,948,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan | 840,000,000 | 257,000,000 | | 1,097,000,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna | 1,643,624,000 | 239,000,000 | | 1,882,624,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga | 763,310,000 | 131,000,000 | | 894,310,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas | 922,728,000 | 131,000,000 | | 1,053,728,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kota Batam | 1,497,594,000 | 311,000,000 | | 1,808,594,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang | 491,793,000 | 113,000,000 | | 604,793,000 |
| | JUMLAH: | 7,154,997,000 | 1,349,000,000 | - | 8,503,997,000 |
| | | | | | |
| X | BANGKA BELITUNG | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka | 1,278,530,000 | 220,000,000 | | 1,498,530,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung | 952,468,000 | 166,000,000 | | 1,118,468,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat | 829,645,000 | 148,000,000 | | 977,645,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah | 828,592,000 | 148,000,000 | | 976,592,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan | 1,093,229,000 | 166,000,000 | | 1,259,229,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur | 622,008,000 | 112,000,000 | | 734,008,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang | 721,702,000 | 166,000,000 | | 887,702,000 |
| | JUMLAH: | 6,326,174,000 | 1,126,000,000 | - | 7,452,174,000 |
| | | | | | |
| XI | DKI JAKARTA | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | 8,500,000,000 | 637,000,000 | | 9,137,000,000 |
| | JUMLAH: | 8,500,000,000 | 637,000,000 | - | 9,137,000,000 |
| | | | | | |
| XII | JAWA BARAT | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor | 15,279,660,000 | 1,415,000,000 | | 16,694,660,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi | 10,668,295,000 | 813,000,000 | | 11,481,295,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur | 5,658,451,000 | 631,000,000 | | 6,289,451,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung | 8,431,665,000 | 869,000,000 | | 9,300,665,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Garut | 11,355,905,000 | 911,000,000 | | 12,266,905,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya | 4,847,267,000 | 561,000,000 | | 5,408,267,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis | 4,535,655,000 | 519,000,000 | | 5,054,655,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan | 4,142,911,000 | 519,000,000 | | 4,661,911,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon | 7,153,799,000 | 799,000,000 | | 7,952,799,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka | 3,487,213,000 | 449,000,000 | | 3,936,213,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang | 3,726,626,000 | 449,000,000 | | 4,175,626,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu | 5,991,326,000 | 687,000,000 | | 6,678,326,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kabupaten Subang | 4,898,899,000 | 561,000,000 | | 5,459,899,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta | 2,009,823,000 | 281,000,000 | | 2,290,823,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang | 6,039,659,000 | 701,000,000 | | 6,740,659,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi | 4,664,013,000 | 547,000,000 | | 5,211,013,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat | 3,583,363,000 | 435,000,000 | | 4,018,363,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran | 1,838,779,000 | 211,000,000 | | 2,049,779,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Kota Bogor | 1,927,398,000 | 337,000,000 | | 2,264,398,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Kota Sukabumi | 1,138,924,000 | 211,000,000 | | 1,349,924,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Kota Bandung | 6,277,841,000 | 1,023,000,000 | | 7,300,841,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Kota Cirebon | 1,685,172,000 | 309,000,000 | | 1,994,172,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan Kota Bekasi | 2,596,974,000 | 435,000,000 | | 3,031,974,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|
| | | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 6 |
| 24 | Dinas Kesehatan | Kota Depok | 2,566,655,000 | 449,000,000 | | 3,015,655,000 |
| 25 | Dinas Kesehatan | Kota Cimahi | 972,323,000 | 183,000,000 | | 1,155,323,000 |
| 26 | Dinas Kesehatan | Kota Tasikmalaya | 1,558,041,000 | 281,000,000 | | 1,839,041,000 |
| 27 | Dinas Kesehatan | Kota Banjar | 738,166,000 | 141,000,000 | | 879,166,000 |
| JUMLAH: | | | 127,774,803,000 | 14,727,000,000 | - | 142,501,803,000 |
| XIII JAWA TENGAH | | | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Cilacap | 4,510,612,000 | 536,000,000 | | 5,046,612,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Banyumas | 4,597,543,000 | 550,000,000 | | 5,147,543,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Purbalingga | 2,250,507,000 | 312,000,000 | | 2,562,507,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Banjarnegara | 3,871,599,000 | 494,000,000 | | 4,365,599,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Kebumen | 4,067,663,000 | 494,000,000 | | 4,561,663,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Purworejo | 2,901,732,000 | 382,000,000 | | 3,283,732,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Wonosobo | 2,430,737,000 | 340,000,000 | | 2,770,737,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Magelang | 3,269,316,000 | 410,000,000 | | 3,679,316,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Boyolali | 3,126,488,000 | 410,000,000 | | 3,536,488,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Klaten | 3,919,914,000 | 480,000,000 | | 4,399,914,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Sukoharjo | 1,261,386,000 | 172,000,000 | | 1,433,386,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Wonogiri | 3,790,382,000 | 480,000,000 | | 4,270,382,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Karanganyar | 2,232,954,000 | 298,000,000 | | 2,530,954,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Sragen | 2,787,985,000 | 354,000,000 | | 3,141,985,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Grobogan | 3,302,723,000 | 424,000,000 | | 3,726,723,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Blora | 2,721,925,000 | 368,000,000 | | 3,089,925,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Rembang | 1,642,948,000 | 228,000,000 | | 1,870,948,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Pati | 3,206,442,000 | 410,000,000 | | 3,616,442,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Kudus | 1,848,376,000 | 270,000,000 | | 2,118,376,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Jepara | 2,128,737,000 | 298,000,000 | | 2,426,737,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Demak | 2,773,829,000 | 382,000,000 | | 3,155,829,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Semarang | 2,739,520,000 | 368,000,000 | | 3,107,520,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Temanggung | 2,483,672,000 | 340,000,000 | | 2,823,672,000 |
| 24 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Kendal | 3,216,627,000 | 424,000,000 | | 3,640,627,000 |
| 25 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Batang | 2,130,579,000 | 298,000,000 | | 2,428,579,000 |
| 26 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Pekalongan | 2,710,195,000 | 368,000,000 | | 3,078,195,000 |
| 27 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Pemasang | 2,244,442,000 | 312,000,000 | | 2,556,442,000 |
| 28 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Tegal | 3,069,429,000 | 410,000,000 | 1,200,000,000 | 4,679,429,000 |
| 29 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Brebes | 4,238,214,000 | 536,000,000 | | 4,774,214,000 |
| 30 | Dinas Kesehatan | Kota Magelang | 368,644,000 | 90,000,000 | | 458,644,000 |
| 31 | Dinas Kesehatan | Kota Surakarta | 1,301,326,000 | 242,000,000 | | 1,543,326,000 |
| 32 | Dinas Kesehatan | Kota Salatiga | 445,493,000 | 100,000,000 | | 545,493,000 |
| 33 | Dinas Kesehatan | Kota Semarang | 3,059,042,000 | 522,000,000 | | 3,581,042,000 |
| 34 | Dinas Kesehatan | Kota Pekalongan | 1,052,118,000 | 200,000,000 | | 1,252,118,000 |
| 35 | Dinas Kesehatan | Kota Tegal | 596,598,000 | 116,000,000 | | 712,598,000 |
| JUMLAH: | | | 92,299,697,000 | 12,418,000,000 | 1,200,000,000 | 105,917,697,000 |
| XIV DI YOGYAKARTA | | | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Kulon Progo | 2,037,942,000 | 298,000,000 | | 2,335,942,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Bantul | 2,728,488,000 | 382,000,000 | | 3,110,488,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Gunung Kidul | 3,103,087,000 | 424,000,000 | | 3,527,087,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan | Kabupaten Sleman | 2,629,141,000 | 354,000,000 | | 2,983,141,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan | Kota Yogyakarta | 1,380,131,000 | 256,000,000 | | 1,636,131,000 |
| JUMLAH: | | | 11,878,789,000 | 1,714,000,000 | - | 13,592,789,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|
| | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| | | | | | |
| XV | JAWA TIMUR | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan | 2,345,619,000 | 341,000,000 | | 2,686,619,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo | 3,224,394,000 | 439,000,000 | | 3,663,394,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek | 2,202,810,000 | 313,000,000 | | 2,515,810,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung | 3,274,898,000 | 439,000,000 | | 3,713,898,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar | 2,471,641,000 | 341,000,000 | | 2,812,641,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri | 4,028,844,000 | 523,000,000 | | 4,551,844,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Malang | 4,792,555,000 | 551,000,000 | | 5,343,555,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang | 2,616,609,000 | 355,000,000 | | 2,971,609,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Jember | 6,085,893,000 | 691,000,000 | | 6,776,893,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi | 5,199,964,000 | 635,000,000 | | 5,834,964,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso | 3,101,131,000 | 355,000,000 | | 3,456,131,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo | 1,980,622,000 | 243,000,000 | | 2,223,622,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo | 3,477,910,000 | 467,000,000 | | 3,944,910,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan | 3,714,880,000 | 467,000,000 | | 4,181,880,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo | 2,855,517,000 | 369,000,000 | | 3,224,517,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto | 2,840,826,000 | 383,000,000 | | 3,223,826,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang | 3,748,199,000 | 481,000,000 | | 4,229,199,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk | 2,120,858,000 | 285,000,000 | | 2,405,858,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun | 2,576,603,000 | 369,000,000 | | 2,945,603,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan | 2,193,161,000 | 313,000,000 | | 2,506,161,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi | 2,517,960,000 | 341,000,000 | | 2,858,960,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro | 3,890,631,000 | 509,000,000 | | 4,399,631,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban | 3,392,717,000 | 467,000,000 | | 3,859,717,000 |
| 24 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan | 3,810,825,000 | 467,000,000 | | 4,277,825,000 |
| 25 | Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik | 3,466,761,000 | 453,000,000 | | 3,919,761,000 |
| 26 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan | 2,781,517,000 | 313,000,000 | | 3,094,517,000 |
| 27 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang | 2,610,477,000 | 299,000,000 | | 2,909,477,000 |
| 28 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan | 2,347,438,000 | 285,000,000 | | 2,632,438,000 |
| 29 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep | 3,292,572,000 | 425,000,000 | | 3,717,572,000 |
| 30 | Dinas Kesehatan Kota Kediri | 688,035,000 | 131,000,000 | | 819,035,000 |
| 31 | Dinas Kesehatan Kota Blitar | 222,765,000 | 75,000,000 | | 297,765,000 |
| 32 | Dinas Kesehatan Kota Malang | 1,153,492,000 | 215,000,000 | | 1,368,492,000 |
| 33 | Dinas Kesehatan Kota Probolinggo | 446,396,000 | 100,000,000 | | 546,396,000 |
| 34 | Dinas Kesehatan Kota Pasuruan | 594,693,000 | 117,000,000 | | 711,693,000 |
| 35 | Dinas Kesehatan Kota Mojokerto | 369,365,000 | 90,000,000 | | 459,365,000 |
| 36 | Dinas Kesehatan Kota Madiun | 451,246,000 | 100,000,000 | | 551,246,000 |
| 37 | Dinas Kesehatan Kota Surabaya | 5,573,120,000 | 873,000,000 | | 6,446,120,000 |
| 38 | Dinas Kesehatan Kota Batu | 368,989,000 | 90,000,000 | | 458,989,000 |
| | JUMLAH: | 102,831,933,000 | 13,710,000,000 | - | 116,541,933,000 |
| | | | | | |
| XVI | BANTEN | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang | 5,048,296,000 | 506,000,000 | | 5,554,296,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak | 5,661,853,000 | 562,000,000 | | 6,223,853,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang | 5,174,168,000 | 604,000,000 | | 5,778,168,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Serang | 3,403,101,000 | 436,000,000 | | 3,839,101,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kota Tangerang | 2,585,303,000 | 450,000,000 | | 3,035,303,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kota Cilegon | 614,694,000 | 114,000,000 | | 728,694,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kota Serang | 1,240,117,000 | 226,000,000 | | 1,466,117,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan | 1,500,000,000 | 352,000,000 | | 1,852,000,000 |
| | JUMLAH: | 25,227,532,000 | 3,250,000,000 | - | 28,477,532,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| | | | | | |
| XVII | BALI | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana | 958,887,000 | 165,000,000 | | 1,123,887,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan | 2,174,996,000 | 325,000,000 | | 2,499,996,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Badung | 780,000,000 | 213,000,000 | | 993,000,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar | 1,444,294,000 | 213,000,000 | | 1,657,294,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung | 871,317,000 | 149,000,000 | | 1,020,317,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli | 1,173,787,000 | 197,000,000 | | 1,370,787,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Karang Asem | 1,236,008,000 | 197,000,000 | | 1,433,008,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng | 2,183,769,000 | 325,000,000 | | 2,508,769,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kota Denpasar | 660,000,000 | 181,000,000 | | 841,000,000 |
| | JUMLAH: | 11,483,058,000 | 1,965,000,000 | - | 13,448,058,000 |
| | | | | | |
| XVIII | NUSA TENGGARA BARAT | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat | 2,676,482,000 | 414,000,000 | | 3,090,482,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah | 4,836,552,000 | 606,000,000 | | 5,442,552,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur | 5,535,988,000 | 702,000,000 | | 6,237,988,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa | 4,149,010,000 | 606,000,000 | | 4,755,010,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu | 1,273,071,000 | 222,000,000 | | 1,495,071,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bima | 3,145,513,000 | 486,000,000 | | 3,631,513,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat | 1,382,617,000 | 222,000,000 | | 1,604,617,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara | 1,128,986,000 | 198,000,000 | | 1,326,986,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kota Mataram | 967,825,000 | 270,000,000 | | 1,237,825,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kota Bima | 427,474,000 | 126,000,000 | | 553,474,000 |
| | JUMLAH: | 25,523,518,000 | 3,852,000,000 | - | 29,375,518,000 |
| | | | | | |
| XIX | NUSA TENGGARA TIMUR | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat | 1,141,425,000 | 190,000,000 | | 1,331,425,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur | 4,180,794,000 | 580,000,000 | | 4,760,794,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang | 5,035,023,000 | 684,000,000 | | 5,719,023,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan | 5,801,183,000 | 788,000,000 | | 6,589,183,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara | 4,956,823,000 | 684,000,000 | | 5,640,823,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Belu | 3,785,065,000 | 450,000,000 | | 4,235,065,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Alor | 4,428,904,000 | 632,000,000 | | 5,060,904,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata | 1,568,634,000 | 242,000,000 | | 1,810,634,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur | 3,843,958,000 | 528,000,000 | | 4,371,958,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka | 4,896,144,000 | 606,000,000 | | 5,502,144,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Ende | 4,576,657,000 | 632,000,000 | | 5,208,657,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada | 2,454,572,000 | 372,000,000 | | 2,826,572,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai | 3,948,321,000 | 554,000,000 | | 4,502,321,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao | 2,092,076,000 | 320,000,000 | | 2,412,076,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat | 2,717,310,000 | 398,000,000 | | 3,115,310,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | 1,332,307,000 | 216,000,000 | | 1,548,307,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya | 1,615,099,000 | 268,000,000 | | 1,883,099,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo | 1,269,722,000 | 190,000,000 | | 1,459,722,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur | 3,956,439,000 | 580,000,000 | | 4,536,439,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua | 1,082,130,000 | 164,000,000 | | 1,246,130,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka | 3,785,065,000 | 450,000,000 | | 4,235,065,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Kota Kupang | 1,002,593,000 | 268,000,000 | | 1,270,593,000 |
| | JUMLAH: | 69,470,244,000 | 9,796,000,000 | - | 79,266,244,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| | | | | | |
| XX | KALIMANTAN BARAT | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas | 4,863,242,000 | 599,000,000 | | 5,462,242,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang | 2,934,773,000 | 379,000,000 | | 3,313,773,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Landak | 2,941,474,000 | 357,000,000 | | 3,298,474,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak | 1,822,954,000 | 313,000,000 | | 2,135,954,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau | 3,291,648,000 | 401,000,000 | | 3,692,648,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang | 4,516,766,000 | 533,000,000 | | 5,049,766,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang | 3,516,964,000 | 445,000,000 | | 3,961,964,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu | 4,207,940,000 | 511,000,000 | | 4,718,940,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau | 1,883,304,000 | 269,000,000 | | 2,152,304,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi | 1,770,095,000 | 247,000,000 | | 2,017,095,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara | 1,239,294,000 | 181,000,000 | | 1,420,294,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya | 2,599,145,000 | 445,000,000 | | 3,044,145,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | 2,226,339,000 | 511,000,000 | | 2,737,339,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kota Singkawang | 460,794,000 | 115,000,000 | | 575,794,000 |
| | JUMLAH: | 38,274,732,000 | 5,306,000,000 | - | 43,580,732,000 |
| | | | | | |
| XXI | KALIMANTAN TENGAH | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat | 2,169,998,000 | 357,000,000 | | 2,526,998,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur | 2,669,638,000 | 445,000,000 | | 3,114,638,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas | 3,423,609,000 | 577,000,000 | | 4,000,609,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan | 1,559,825,000 | 269,000,000 | | 1,828,825,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara | 2,131,199,000 | 357,000,000 | | 2,488,199,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara | 609,464,000 | 115,000,000 | | 724,464,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau | 1,336,789,000 | 247,000,000 | | 1,583,789,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan | 720,000,000 | 269,000,000 | | 989,000,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan | 2,078,414,000 | 357,000,000 | | 2,435,414,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau | 1,381,453,000 | 247,000,000 | | 1,628,453,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas | 1,888,453,000 | 335,000,000 | | 2,223,453,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur | 1,432,941,000 | 247,000,000 | | 1,679,941,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya | 1,929,540,000 | 313,000,000 | | 2,242,540,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya | 965,717,000 | 225,000,000 | | 1,190,717,000 |
| | JUMLAH: | 24,297,040,000 | 4,360,000,000 | - | 28,657,040,000 |
| | | | | | |
| XXII | KALIMANTAN SELATAN | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut | 1,080,000,000 | 401,000,000 | | 1,481,000,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Baru | 3,518,743,000 | 599,000,000 | | 4,117,743,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar | 3,106,402,000 | 511,000,000 | | 3,617,402,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala | 3,159,498,000 | 423,000,000 | | 3,582,498,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin | 780,000,000 | 291,000,000 | | 1,071,000,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 2,732,063,000 | 467,000,000 | | 3,199,063,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 2,408,113,000 | 423,000,000 | | 2,831,113,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara | 2,106,777,000 | 291,000,000 | | 2,397,777,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | 2,054,954,000 | 357,000,000 | | 2,411,954,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu | 1,794,137,000 | 313,000,000 | | 2,107,137,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan | 1,347,335,000 | 247,000,000 | | 1,594,335,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | 2,580,513,000 | 577,000,000 | | 3,157,513,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kota Banjar Baru | 746,520,000 | 181,000,000 | | 927,520,000 |
| | JUMLAH: | 27,415,055,000 | 5,081,000,000 | - | 32,496,055,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| | | | | | |
| XXIII | KALIMANTAN TIMUR | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Paser | 1,020,000,000 | 381,000,000 | | 1,401,000,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat | 3,190,391,000 | 403,000,000 | | 3,593,391,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara | 1,800,000,000 | 667,000,000 | | 2,467,000,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur | 1,140,000,000 | 425,000,000 | | 1,565,000,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Berau | 1,020,000,000 | 381,000,000 | | 1,401,000,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara | 660,000,000 | 249,000,000 | | 909,000,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Hulu | 886,219,000 | 117,000,000 | | 1,003,219,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kota Balikpapan | 1,620,000,000 | 601,000,000 | | 2,221,000,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kota Samarinda | 1,440,000,000 | 535,000,000 | | 1,975,000,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kota Bontang | 360,000,000 | 139,000,000 | | 499,000,000 |
| | JUMLAH: | 13,136,610,000 | 3,898,000,000 | - | 17,034,610,000 |
| XXIV | KALIMANTAN UTARA | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau | 780,000,000 | 294,000,000 | | 1,074,000,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan | 720,000,000 | 272,000,000 | | 992,000,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan | 720,000,000 | 272,000,000 | | 992,000,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung | 240,000,000 | 100,000,000 | | 340,000,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kota Tarakan | 420,000,000 | 162,000,000 | | 582,000,000 |
| | JUMLAH: | 2,880,000,000 | 1,100,000,000 | - | 3,980,000,000 |
| XXV | SULAWESI UTARA | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow | 1,849,477,000 | 328,000,000 | | 2,177,477,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa | 2,486,390,000 | 428,000,000 | | 2,914,390,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe | 2,477,085,000 | 328,000,000 | | 2,805,085,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud | 3,125,640,000 | 428,000,000 | | 3,553,640,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan | 2,042,618,000 | 348,000,000 | | 2,390,618,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara | 1,358,914,000 | 228,000,000 | | 1,586,914,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 1,258,282,000 | 228,000,000 | | 1,486,282,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro | 1,975,486,000 | 268,000,000 | | 2,243,486,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara | 1,437,036,000 | 248,000,000 | | 1,685,036,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow | 769,670,000 | 148,000,000 | | 917,670,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow | 538,235,000 | 108,000,000 | | 646,235,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kota Manado | 1,485,545,000 | 328,000,000 | | 1,813,545,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kota Bitung | 814,753,000 | 188,000,000 | | 1,002,753,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kota Tomohon | 619,573,000 | 148,000,000 | | 767,573,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu | 434,218,000 | 108,000,000 | | 542,218,000 |
| | JUMLAH: | 22,672,922,000 | 3,860,000,000 | - | 26,532,922,000 |
| XXVI | SULAWESI TENGAH | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan | 1,445,164,000 | 207,000,000 | | 1,652,164,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai | 3,906,015,000 | 487,000,000 | | 4,393,015,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali | 1,444,792,000 | 187,000,000 | | 1,631,792,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Poso | 3,335,652,000 | 427,000,000 | | 3,762,652,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala | 2,312,680,000 | 307,000,000 | | 2,619,680,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli | 2,079,549,000 | 287,000,000 | | 2,366,549,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Buol | 1,680,663,000 | 227,000,000 | | 1,907,663,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong | 3,297,755,000 | 427,000,000 | | 3,724,755,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una | 1,844,989,000 | 267,000,000 | | 2,111,989,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi | 2,927,251,000 | 387,000,000 | | 3,314,251,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Laut | 722,582,000 | 107,000,000 | | 829,582,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara | 1,605,324,000 | 207,000,000 | | 1,812,324,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kota Palu | 1,104,985,000 | 247,000,000 | | 1,351,985,000 |
| | JUMLAH: | 27,707,401,000 | 3,771,000,000 | - | 31,478,401,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| | | | | | |
| XXVII | SULAWESI SELATAN | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar | 2,260,086,000 | 286,000,000 | | 2,546,086,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba | 2,564,848,000 | 386,000,000 | | 2,950,848,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng | 1,480,218,000 | 266,000,000 | | 1,746,218,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto | 2,880,786,000 | 366,000,000 | | 3,246,786,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar | 1,938,033,000 | 306,000,000 | | 2,244,033,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa | 3,384,826,000 | 506,000,000 | | 3,890,826,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai | 2,054,402,000 | 326,000,000 | | 2,380,402,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Maros | 1,810,936,000 | 286,000,000 | | 2,096,936,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan | 3,789,094,000 | 466,000,000 | | 4,255,094,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Barru | 1,476,136,000 | 246,000,000 | | 1,722,136,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bone | 5,518,292,000 | 766,000,000 | | 6,284,292,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng | 2,136,784,000 | 346,000,000 | | 2,482,784,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo | 2,956,086,000 | 466,000,000 | | 3,422,086,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang | 1,780,759,000 | 286,000,000 | | 2,066,759,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang | 1,992,547,000 | 306,000,000 | | 2,298,547,000 |
| 16 | Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang | 1,603,057,000 | 266,000,000 | | 1,869,057,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu | 2,956,419,000 | 426,000,000 | | 3,382,419,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja | 2,531,656,000 | 426,000,000 | | 2,957,656,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara | 1,693,639,000 | 266,000,000 | | 1,959,639,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur | 2,003,826,000 | 306,000,000 | | 2,309,826,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara | 3,945,637,000 | 506,000,000 | | 4,451,637,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Kota Makassar | 4,554,995,000 | 866,000,000 | | 5,420,995,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare | 532,266,000 | 126,000,000 | | 658,266,000 |
| 24 | Dinas Kesehatan Kota Palopo | 1,007,803,000 | 226,000,000 | | 1,233,803,000 |
| | JUMLAH: | 58,853,131,000 | 9,024,000,000 | - | 67,877,131,000 |
| | | | | | |
| XXVIII | SULAWESI TENGGARA | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Buton | 5,545,706,000 | 667,000,000 | | 6,212,706,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Muna | 7,078,699,000 | 847,000,000 | | 7,925,699,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe | 4,050,384,000 | 487,000,000 | | 4,537,384,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka | 1,611,783,000 | 247,000,000 | | 1,858,783,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan | 4,019,108,000 | 467,000,000 | | 4,486,108,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana | 3,305,910,000 | 447,000,000 | | 3,752,910,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi | 3,094,100,000 | 407,000,000 | | 3,501,100,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara | 2,567,316,000 | 327,000,000 | | 2,894,316,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara | 1,455,691,000 | 207,000,000 | | 1,662,691,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara | 840,000,000 | 287,000,000 | | 1,127,000,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur | 1,746,099,000 | 267,000,000 | | 2,013,099,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan | 1,181,362,000 | 147,000,000 | | 1,328,362,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kota Kendari | 1,394,579,000 | 307,000,000 | | 1,701,579,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau | 1,490,617,000 | 347,000,000 | | 1,837,617,000 |
| | JUMLAH: | 39,381,354,000 | 5,458,000,000 | - | 44,839,354,000 |
| | | | | | |
| XXIX | GORONTALO | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo | 1,544,602,000 | 227,000,000 | | 1,771,602,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo | 2,621,135,000 | 427,000,000 | | 3,048,135,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato | 2,196,767,000 | 327,000,000 | | 2,523,767,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango | 2,325,883,000 | 407,000,000 | | 2,732,883,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara | 2,155,339,000 | 307,000,000 | | 2,462,339,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kota Gorontalo | 874,954,000 | 207,000,000 | | 1,081,954,000 |
| | JUMLAH: | 11,718,680,000 | 1,902,000,000 | - | 13,620,680,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| | | | | | |
| XXX | SULAWESI BARAT | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Majene | 1,671,979,000 | 227,000,000 | | 1,898,979,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar | 3,470,815,000 | 407,000,000 | | 3,877,815,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa | 2,702,207,000 | 347,000,000 | | 3,049,207,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju | 3,881,584,000 | 447,000,000 | | 4,328,584,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara | 2,028,493,000 | 287,000,000 | | 2,315,493,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah | 1,764,356,000 | 207,000,000 | | 1,971,356,000 |
| | JUMLAH: | 15,519,434,000 | 1,922,000,000 | - | 17,441,434,000 |
| | | | | | |
| XXXI | MALUKU | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 2,216,807,000 | 375,000,000 | | 2,591,807,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara | 2,114,312,000 | 431,000,000 | | 2,545,312,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah | 7,043,203,000 | 935,000,000 | | 7,978,203,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Buru | 1,655,678,000 | 263,000,000 | | 1,918,678,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru | 4,222,838,000 | 683,000,000 | | 4,905,838,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat | 3,316,338,000 | 487,000,000 | | 3,803,338,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur | 3,315,579,000 | 543,000,000 | | 3,858,579,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya | 3,811,625,000 | 571,000,000 | | 4,382,625,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan | 1,907,328,000 | 347,000,000 | | 2,254,328,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kota Ambon | 2,310,198,000 | 627,000,000 | | 2,937,198,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kota Tual | 1,279,320,000 | 375,000,000 | | 1,654,320,000 |
| | JUMLAH: | 33,193,226,000 | 5,637,000,000 | - | 38,830,226,000 |
| | | | | | |
| XXXII | MALUKU UTARA | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat | 2,170,886,000 | 319,000,000 | | 2,489,886,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah | 1,980,390,000 | 319,000,000 | | 2,299,390,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula | 1,680,939,000 | 291,000,000 | | 1,971,939,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan | 6,021,404,000 | 851,000,000 | | 6,872,404,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara | 3,123,878,000 | 487,000,000 | | 3,610,878,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur | 2,603,002,000 | 403,000,000 | | 3,006,002,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai | 1,043,613,000 | 179,000,000 | | 1,222,613,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu | 1,176,657,000 | 207,000,000 | | 1,383,657,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kota Ternate | 1,038,372,000 | 291,000,000 | | 1,329,372,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan | 600,000,000 | 291,000,000 | | 891,000,000 |
| | JUMLAH: | 21,439,141,000 | 3,638,000,000 | - | 25,077,141,000 |
| | | | | | |
| XXXIII | PAPUA | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke | 4,028,743,000 | 613,000,000 | | 4,641,743,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya | 2,623,815,000 | 403,000,000 | | 3,026,815,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura | 3,032,258,000 | 583,000,000 | | 3,615,258,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire | 4,927,987,000 | 793,000,000 | | 5,720,987,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen | 2,492,585,000 | 403,000,000 | | 2,895,585,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor | 3,626,884,000 | 553,000,000 | | 4,179,884,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai | 3,354,838,000 | 553,000,000 | | 3,907,838,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya | 1,600,669,000 | 253,000,000 | | 1,853,669,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika | 2,534,373,000 | 403,000,000 | | 2,937,373,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel | 3,346,371,000 | 613,000,000 | | 3,959,371,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi | 2,209,605,000 | 343,000,000 | | 2,552,605,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat | 2,653,873,000 | 403,000,000 | | 3,056,873,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo | 6,407,138,000 | 943,000,000 | | 7,350,138,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang | 5,617,623,000 | 883,000,000 | | 6,500,623,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tolikara | 4,742,678,000 | 763,000,000 | | 5,505,678,000 |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| NO | SATUAN KERJA | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) | | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER | JUMLAH |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|
| | | ALOKASI PUSKESMAS | ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| 16 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi | 540,000,000 | 283,000,000 | | 823,000,000 |
| 17 | Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom | 1,870,002,000 | 313,000,000 | | 2,183,002,000 |
| 18 | Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen | 1,823,758,000 | 313,000,000 | | 2,136,758,000 |
| 19 | Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori | 951,919,000 | 163,000,000 | | 1,114,919,000 |
| 20 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya | 1,131,359,000 | 223,000,000 | | 1,354,359,000 |
| 21 | Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga | 1,343,511,000 | 253,000,000 | | 1,596,511,000 |
| 22 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya | 1,800,073,000 | 313,000,000 | | 2,113,073,000 |
| 23 | Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah | 1,169,601,000 | 163,000,000 | | 1,332,601,000 |
| 24 | Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo | 1,327,555,000 | 223,000,000 | | 1,550,555,000 |
| 25 | Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak | 1,376,445,000 | 253,000,000 | | 1,629,445,000 |
| 26 | Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai | 1,736,911,000 | 313,000,000 | | 2,049,911,000 |
| 27 | Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya | 1,015,754,000 | 193,000,000 | | 1,208,754,000 |
| 28 | Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai | 1,759,469,000 | 313,000,000 | | 2,072,469,000 |
| 29 | Dinas Kesehatan Kota Jayapura | 1,247,400,000 | 373,000,000 | | 1,620,400,000 |
| JUMLAH: | | 72,293,197,000 | 12,197,000,000 | - | 84,490,197,000 |
| XXXIV | PAPUA BARAT | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak | 1,499,678,000 | 315,000,000 | | 1,814,678,000 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana | 480,000,000 | 255,000,000 | | 735,000,000 |
| 3 | Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama | 1,179,523,000 | 195,000,000 | | 1,374,523,000 |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni | 3,877,606,000 | 615,000,000 | | 4,492,606,000 |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari | 2,132,710,000 | 435,000,000 | | 2,567,710,000 |
| 6 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan | 2,635,820,000 | 465,000,000 | | 3,100,820,000 |
| 7 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong | 3,128,192,000 | 525,000,000 | | 3,653,192,000 |
| 8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat | 3,653,724,000 | 585,000,000 | | 4,238,724,000 |
| 9 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw | 804,448,000 | 165,000,000 | | 969,448,000 |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Maybrat | 2,418,254,000 | 435,000,000 | | 2,853,254,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan | 609,345,000 | 135,000,000 | | 744,345,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Arfak | 1,371,028,000 | 285,000,000 | | 1,656,028,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan Kota Sorong | 614,564,000 | 195,000,000 | | 809,564,000 |
| JUMLAH: | | 24,404,892,000 | 4,605,000,000 | - | 29,009,892,000 |
| JUMLAH I S/D XXXIII (SELURUH INDONESIA) | | 1,199,999,771,000 | 179,268,000,000 | 1,200,000,000 | 1,380,467,771,000 |

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK